

## MANIFESTO PENDIDIKAN KARAKTER DAN FEMINIS

Upaya untuk menyuburkan lahan kering dunia literasi di kalangan mahasiswa memang agak sulit, terlebih hal ini didukung dengan maraknya fenomena hoax yang sangat massif, ditambah kesadaran mahasiswa untuk mentradisikan menulis serta membaca juga masih minim.

Berangkat dari fenomena tersebut dengan tertatih beberapa mahasiswa Pendidikan agama islam, tergerak untuk memberikan ruang pencerahan yang berwujud kegiatan kajian bulanan. Narasumber yang kompeten dibidangnya pun dihadirkan satu demi satu, antusiasme peserta kajian sangat tinggi, semangat membara menggelayut pada tubuh penyelenggara kajian.

Kajian yang dihadirkan akan menjadi angin lalu manakala hanya sebatas sebagai opini semata, para mahasiswa menginisiasi untuk mengumpulkan satu demi satu artikel hasil kajian untuk dibukukan.

Terbitnya buku ini merupakan upaya kongkrit dalam menumbuh kembangkan dan menghadirkan nilai kreatifitas dalam menulis. Upaya kongkrit dalam menghadirkan nilai berbagi antar sesama dan upaya kongkrit dalam menghadirkan nilai berpikir kritis.

um surabaya

Head Office :  
Jl. Sateja No. 59 Mulyorejo Surabaya  
Telp (+62 87701 798766)  
Email p3@um-surabaya.ac.id  
www.p3.um-surabaya.ac.id



um surabaya

Evi Nur Cahyani  
Thoriq Kemal  
Zuhriani Mahzura

## MANIFESTO PENDIDIKAN KARAKTER DAN FEMINIS

### Refleksi Essay Pendidikan Karakter dan Feminis

Kata Pengantar :  
**Dr. M. Arfan Muammar, M.Pd.I**  
Editor :  
**Charis Hidayat**

**Kata Pengantar**

Dr. dr. Sukadiono, M.M  
(Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya)

**Editor**

Charis Hidayat

**Penulis :**

Evi Nur Cahyani  
Thoriq Kemal  
Zuhraini Mahzura

**MANIFESTO PENDIDIKAN  
KARAKTER  
DAN FEMINIS**

# **Kata Pengantar**

Dr. dr. Sukadiono, M.M  
(Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Upaya untuk menyuburkan lahan kering dunia literasi di kalangan mahasiswa memang agak sulit, terlebih hal ini didukung dengan maraknya fenomena hoax yang sangat massif, ditambah kesadaran mahasiswa untuk mentradisikan menulis serta membaca juga masih minim.

Berangkat dari fenomena tersebut dengan tertatih beberapa mahasiswa Pendidikan agama islam, tergerak untuk memberikan ruang pencerahan yang berwujud kegiatan kajian bulanan. Narasumber yang kompeten dibidangnya pun dihadirkan satu demi satu, antusiasme peserta kajian sangat tinggi, semangat membara menggelayut pada tubuh penyelenggara kajian.

Kajian yang dihadirkan akan menjadi angin lalu manakala hanya sebatas sebagai opini semata, para mahasiswa menginisiasi untuk mengumpulkan satu demi satu artikel hasil kajian untuk dibukukan.

Terbitnya buku ini merupakan upaya kongkrit dalam menumbuh kembangkan dan menghadirkan nilai kreatifitas dalam menulis. Upaya kongkrit dalam menghadirkan nilai berbagi antar sesama dan upaya kongkrit dalam menghadirkan nilai berpikir kritis.

Semoga dengan hadirnya buku antologi karya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya ini dapat memotivasi teman-teman mahasiswa yang lain untuk sadar literasi. Selamat membaca !

## **Prakata Penulis**

Semenjak dilantik pada hari Jumat 22 Februari 2019, kami selaku pengurus himpunan mahasiswa program studi Pendidikan agama islam (HIMAPAI) periode 2019-2020 resmi mengemban amanah untuk menjalankan tugas di organisasi agar menjadi lebih baik dari periode sebelumnya. Dengan diketuai oleh walikota yang baru, Hisam Shidqi, maka kami harus siap bekerja sama serta bergotong royong disini.

Saya (Thoriq Kemal) diamanahi oleh ketua hima untuk menjadi Ketua Departemen Pendidikan yang bergerak di bidang literasi. Dengan dibantu oleh sekretaris saya, mbak Evi Nur Cahyani, agar bisa menjalankan program kerja bersama-sama. Awalnya saya bingung mau memberikan kontribusi apa di bidang yang sedang dipegang ini, dan akhirnya melalui diskusi agak panjang jadilah program kerja yang sederhana. Salah satunya adalah kajian rutin bulanan yang kami beri nama “*NgaSa*”, kepanjangannya adalah Ngaji Santai. Untuk pemateri kami ambil dari dosen, alumni, dan mahasiswa PAI UM Surabaya.

Dan kami sangat bersyukur karena kajian ini telah dilaksanakan 4 kali dan itu rutin satu bulan sekali. Kajian pertama kami dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 dengan tema “Pendidikan Karakter: Upaya Negara Dalam Membangun

Generasi Emas Tahun 2045”, yang diisi oleh dosen PAI Ustad M. Fazlurrahman Hadi, Lc.,M.Pd.I. Kajian kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 dengan tema “Ideologi-Ideologi Pendidikan” yang diisi oleh Ustad Asy’ari, M.Pd. Kajian ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan tema “Feminisme Dalam Sudut Pandang Pendidikan Islam” yang diisi oleh ayunda Mazidatul Rohmah, S.Pd. Dan kajian terakhir dilaksanakan pada tanggal 8 November 2019 dengan tema “Konsep Mendidik ala Nabi Muhammad Saw.” yang diisi oleh mahasiswa PAI yang bernama Rahmanda Rizky Ardiansyah.

Seusai itu, kami bingung apa yang harus “ditelurkan” setelah akhir periode ini. Sejak awal kami berencana untuk mengadakan seminar literasi dengan hasil akhir buku. Tapi karena ada sedikit kendala, kami ulirkan untuk membuat buku antologi yang ditulis oleh kawan-kawan PAI dengan tema kajian Ngasa. Setelah berjalannya waktu, akhirnya kami himpun tulisan ini menjadi dua tema yaitu tentang pendidikan karakter dan wacana feminisme.

Dan tak lupa, berkat bantuan dosen pembimbing kami yaitu Dr. M. Arfan Mu’ammam, M.Pd.I. serta M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I. yang telah memberikan arahan kepada kami sehingga buku ini dapat selesai dengan baik. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Program Studi Pendidikan

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Moch. Charis Hidayat, M.Pd.I. yang sangat mendukung penuh terealisasinya buku antologi kecil ini. Dan juga walikota HIMA PAI, Hisam Shidqi, berkat dukungan anda program kerja kami dapat berjalan dengan baik. Sebagai penutup, kami harap buku ini dapat menjadi ladang amal kepada teman-teman kami, terutama kawan-kawan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Terakhir, kami ucapkan selamat membaca!

Surabaya, 8 Januari 2020

Kepala Departemen Pendidikan  
HIMA PAI UM SURABAYA 2019

## Daftar isi

Kata Pengantar.....	2
Prakata Penulis.....	3
Daftar Isi.....	5
<b>BAGIAN I – PENDIDIKAN KARAKTER</b>	
Konsep Pendidikan Karakter.....	8
Mengapa Pendidikan Karakter itu Penting?.....	17
Membumikan Kembali konsep Pendidikan Berbasis Adab.....	25
Kebijakan Pendidikan Karakter.....	35
Islam Dan Pancasila Sebagai Basis Pendidikan Karakter di Indonesia.....	40
Tarbiyah Al Babuwah sebagai Basis Pendidikan Indonesia.....	59
Gus Dur dan Pembaharuan kurikulum Pesantren.....	68
<b>BAGIAN II – GERAKAN FEMINIS</b>	
Gerakan Femisime.....	75
Hak Hak Kaum Feminis.....	83
Hak Pendidikan bagi Kaum Feminis.....	90
Konsep Feminisme dalam Islam.....	96
Ideologi Sosialisme dan Kapitalisme.....	102
Daftar Pustaka.....	114
Tentang Penulis.....	120

**BAGIAN I**

**PENDIDIKAN KARAKTER**

# Konsep Pendidikan Karakter

Evi Nur Cahyani

Membahas tentang konsep pendidikan secara universal perlu dipahami dulu bahwa sebenarnya telah ada konsep pendidikan karakter yang asli (*genuine*) Indonesia. Konsep pendidikan karakter yang asli Indonesia itu dapat digali dari berbagai adat-istiadat dan budaya di Indonesia.

Mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat multi-pluralis tentu akan sedikit repot jika seluruh adat dan budaya di Indonesia ditampilkan disini. Untuk memudahkan pembahasan, dengan asumsi bahasa adalah produk adat dan budaya, maka sebagai titik tolak pembahasan yang memiliki penutur terbesar di Indonesia.

Dalam budaya Sunda, prinsip dan etika terkait dengan pergaulan manusia dan Tuhan, dan pergaulan dengan sesama manusia, terutama dilandasi oleh silih asih, silih asah, dan silih asuh. Hal tersebut menunjukkan karakter khas dari budaya Sunda sebagai konsekuensi dari pandangan hidup religiusnya.

Silih asih adalah wujud komunikasi dan interaksi religious sosial yang menekankan kepada sapaan cinta kasih Tuhan serta meresponnya melalui cinta kasih kepada sesama manusia.

Dengan kata lain silih asih merupakan kualitas interaksi yang dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Semangat macam ini melahirkan moralitas egaliter terhadap masyarakat. Dalam tradisi silih asih manusia saling menghormati, tidak ada manusia yang superior maupun yang inferior. Prinsip egaliter ini kemudian melahirkan etos musyawarah, kerja sama, serta sikap untuk bersifat adil.

Masyarakat silih asah dapat dimaknai saling bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan. Tradisi ini telah melahirkan etos dan semangat ilmiah memupuk jiwa curiositas dan saling mengembangkan diri untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan teknologi. Hal ini pada gilirannya diharapkan mampu menciptakan ototomi dan kedisiplinan sehingga tidak bergantung kepada masyarakat lain.

Masyarakat silih asuh memandang kepentingan kolektif maupun kepentingan pribadi mendapat perhatian berimbang melalui saling pantau, saling kontrol, tegur sapa, dan saling memberikan bimbingan. Budaya silih asuh ini kemudian mampu memperkuat ikatan emosional yang telah dikembangkan dalam tradisi silih asih dan silih asah. Ketiga-tiganya menjadi semacam tri pillars yang melandasi adat dan budaya Sunda.

Suku kata Su pada kata Sunda memiliki makna segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter-karakter pokok yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh “orang Sunda” adalah cageur (sehat) jasmani dan ruhani, bageur (baik) dalam berbicara maupun tindakan, bener (benar) dalam tujuan hidup dan langkah perbuatan, singer (muhasabah, mawas diri) agar tidak terjerumus dalam perilaku salah dan keliru, dan pinter (cerdas) dalam pengertian tidak pernah berhenti dalam mencari dan mengembangkan ilmu.

Banyak sekali nilai-nilai karakter Jawa yang sepatutnya dianut dan dikembangkan oleh masyarakat Jawa. Salah satu contoh adalah seperti yang dikembangkan dalam Taman Siswa. Ki Tyasno Sudarto, ketua umum majelis hukum Taman Siswa (2007) seperti yang dikutip oleh Ekowarni (2009) yang menyatakan bahwa dasar filosofis karakter adalah Tri Rahayu (tiga kesejahteraan) yang merupakan nilai-nilai luhur (*supreme values*) dan merupakan pedoman hidup (*guiding principles*) meliputi: Memayu hayuning salira (bagaimana hidup untuk meningkatkan kualitas diri sendiri), Memayu hayuning bangsa (bagaimana membangun kesejahteraan untuk negara dan bangsa),

Memayu hayuning bawana (bagaimana membangun kesejahteraan dunia).

Untuk mencapai Tri Rahayu tersebut, manusia harus memahami, menghayati, serta melaksanakan tugas sucinya sebagai manusia yang tercantum dalam Tri Satya Brata (Tiga Ikrar Bertindak), yaitu: rahayuning bawaba kapurba waskitanig manungsa (kesejahteraan dunia bergantung kepada manusia yang memiliki ketajaman rasa), dharmaning manungsa mahananing rahayu negara (tugas utama manusia adalah menjaga keselamatan negara), rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsane (keselamatan manusia ditentukan pada tata prilakunya, rasa kemanusiaannya).

KPH H. Anglingkusumo salah satu keturunan Paku Alam mencoba mentafsirkan ajaran-ajaran Paku Alam. Diantaranya ajaran yang tertulis di regol (pintu gerbang) puro Pakualaman yang berbunyi wiwara kusuma winayang reka. Wiwara artinya pintu atau terbuka, kusuma berarti budi luhur, winayang artinya sasmita (ilham), reka berarti pola pikir. Sehingga makna keseluruhan adalah orang yang berbudi luhur niscaya selalu terbuka dan bijaksana.

Sementara itu dalam cermin yang dipasang di pintu gerbang Pakualaman tertulis guna titi purun. Guna artinya

bermanfaat, makanya orang yang berilmu harus memanfaatkan ilmunya untuk kesejahteraan dan kemajuan umat manusia. Orang yang berharta harus memanfaatkan hartanya bagi kesejahteraan masyarakatnya, sedangkan orang yang memiliki jabatan harus menjadi pengayom (pelindung) bagi orang yang lemah (*ringkih*) dan panutan yang baik (*uswah hasanah*) bagi pegawainya.

Titi dalam hal ini dimaknai jujur, lebih dan mengerti, artinya benarbenar mengerti pokok persoalan, mengerti bidang tugasnya, mengerti betul kewajibannya. Dalam kaitan ini sebagai pemimpin yang menjadi panutan bawahannya, dituntut berbuat lebih baik dengan memanifestasikan luruh, lereh, liri dalam tindak-tanduk dan pola pikirnya. Luruh berarti tangkas, bersemangat, tetapi tetap lemah lembut. Lereh berarti sabar dan selalu siap menjalankan tugas dengan jujur dan mantap, sedangkan liri berarti bertugas dengan perhitungan tepat, tidak sembrono dan tergesa-gesa.

Purun, maknanya berani, mau dan mampu melakukan. Berani untuk berperilaku baik, menjauhi perbuatan yang jahat dan kotor, berani mengedepankan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar. Dapat menjadi contoh orang lain dalam tindakannya, berani meminta maaf jika berbuat salah dan sanggup memperbaikinya, sanggup mengorbankan segala-galanya untuk

keperluan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya, ikhlas lahir batin dan bekerja penuh tanggung jawab.

Sikap orang Jawa yang lain adalah andhap asor atau lembah manah artinya rendah hati, tidak sombong (ora kumalungkung). Rendah hati berarti tidak mau menonjolkan diri walaupun mempunyai kemampuan (bagai ilmu padi makin merunduk makin berisi). Orang yang andhap asor juga mampu menahan diri, jika dicela tidak mudah marah tetapi justru akan mawas diri apa kekurangan dan kelemahannya.

Di Indonesia, pendidikan karakter sebenarnya sudah lama diimplementasikan dalam sekolah-sekolah, khususnya dalam pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Namun implementasi pendidikan karakter itu masih terseok-seok dan belum optimal. Itu karena pendidikan karakter bukanlah proses menghafal materi soal ujian dan teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, kesatria, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungan kotor. Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan ideal.

Di sinilah bisa kita pahami, mengapa ada kesenjangan antara praktik pendidikan dengan karakter peserta didik. Dunia pendidikan di Indonesia kini bisa dikatakan sedang memasuki masa-masa yang pelik. Kucuran anggaran pendidikan yang sangat besar disertai berbagai terobosan sepertinya belum mampu memecahkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yaitu tentang bagaimana mencetak alumni pendidikan yang unggul, yang beriman, bertakwa, profesional, dan berakhlak, sebagaimana tujuan pendidikan dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dasar, Fungsi dan Tujuan, Pasal 3, UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kementerian Pendidikan Nasional melansir ada sembilan pilar pendidikan karakter (suyanto, 2010) kesembilan pilar tersebut meliputi:

1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya
2. Kemandirian dan tanggung jawab
3. Kejujuran/amanah dan diplomatis
4. Hormat dan santun
5. Dermawan, suka tolong-menolong dan gotong-royong/kerja sama
6. Percaya diri dan kerja keras
7. Kepemimpinan dan keadilan
8. Baik dan rendah hati
9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan

Disamping itu pelaksanaannya juga harus memperhatikan K4 (kesehatan, kebersihan, kerapian, dan keamanan).

Para ahli pendidikan di Indonesia umumnya bersepakat bahwa pendidikan karakter sebaiknya dimulai sejak usia anak-anak (*golden age*), karena usia ini terbukti sangat menentukan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabelitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Oleh karena itu sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dalam lingkungan

keluarga yang merupakan lingkungan awal bagi pertumbuhan anak.

Dalam implementasinya pendidikan karakter umumnya diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tapi menyentuh pada internalisasi, dan pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasi berasal dari empat sumber. Pertama, agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

Kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan atas prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan

yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Posisi budaya yang sedemikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Keempat, tujuan Pendidikan Nasional. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung

# **Mengapa Pendidikan Karakter itu Penting?**

Zuhraini Mahzura

Berbicara tentang karakter mungkin sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter sudah menjadi berbincangan di ruang lingkup keluarga, pekerjaan, dunia pendidikan dan lain sebagainya. Karakter didefinisikan sebagai unsur perilaku yang menekankan unsur somatopsikis (keadaan tubuh memengaruhi jiwa) yang dimiliki oleh manusia. Karakter biasanya dilihat dari perspektif psikologis. Hal ini terkait dengan aspek perilaku, sikap, cara dan kualitas yang membedakan satu orang dengan orang lain atau unsur spesifik yang bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih menonjol dari orang lain. Karakter adalah bagian dari elemen spesifik manusia yang meliputi kemampuan mereka menghadapi tantangan dan kesulitan (Kemko Kesra 2010: 7). Secara individu, karakter bisa jadi bawaan tapi tidak sesuai karakter bangsa. Karakter bangsa tidak lahir. Karakter bangsa akan kuat jika karakter individu rakyat juga kuat (Koellhoffer, 2009). Sebagai unsur penting yang menentukan kekuatan bangsa, karakter bangsa harus ditanamkan atau dikembangkan kepada kaum generasi muda. Generasi muda adalah pemilik dan agen perubahan bangsa. Mereka tidak

mengalami prosesnya menumbuhkan karakter bangsa sejak awal seperti yang dilakukan oleh beberapa pemimpin di masa lalu. Tanpa tindakan apapun menginternalisasi dan mensosialisasikan nilai karakter bangsa, dianggap bahwa generasi muda akan lemah dalam membangun bangsa.

Maka didalam dunia pendidikan, karakter menjadi salah satu acuan guna mengembangkan dan memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter disamakan definisinya dengan pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan religius, atau pendidikan budi pekerti. Istilah ini makin mengemuka ketika berbagai permasalahan muncul sebagai akibat dari kegagalan dari pendidikan di Indonesia. Secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan karakter sebagai bentuk kegiatan mengukir di atas batu yang pada pelaksanaannya tidak mudah/gampang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). pendidikan karakter dapat diartikan pula sebagai upaya dalam mengembangkan potensi peserta didik dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa agar memiliki nilai dan karakter sebagai karakter pribadinya. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi, moral, dan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memutuskan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter sudah lama diterapkan di Indonesia, bahkan dimulai dari zaman

orde lama hingga kini. Pendidikan ini diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran, yaitu Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Sejarah.

Dalam sistem pendidikan karakter dapat mencakup pengajaran dan kepercayaan termasuk kejujuran, integritas, keandalan dan kesetiaan, hormat termasuk memerhatikan orang lain, toleransi dan sopan santun, tanggung jawab, termasuk kerja keras, kemandirian ekonomi, akuntabilitas, ketekunan, dan pengendalian diri dan keadilan termasuk keadilan sebagai konsekuensi dari perilaku buruk, prinsip-prinsip nondiskriminasi dan kebebasan dari prasangka, peduli termasuk kebaikan hati, empati, kasih sayang, pertimbangan, kemurahan hati, serta termasuk cinta negara, perhatian terhadap kebaikan bersama, rasa hormat kepada otoritas dan hukum dan pola pikir masyarakat, mematuhi segala norma-norma yang ada serta mengakui Pancasila sebagai Dasar negara Indonesia.

Pendidikan karakter mempunyai tujuan agar generasi muda mempunyai pribadi yang baik dan dapat diunggulkan, mempunyai karakter yang baik, serta mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Tujuan pendidikan karakter lebih difokuskan pada menanamkan nilai dan mereformasi kehidupan, sehingga bisa sepenuhnya menciptakan karakter. Karakter mulia peserta didik, terpadu dan seimbang, dan bisa dilakukan terus-menerus dalam

kehidupan sehari-hari. Ini menjadi sangat penting karena pendidikan karakter memiliki posisi strategis dalam menciptakan manusia dengan karakter yang mulia. Serta bisa bersaing dengan Negara lain dalam hal intelektual dan moral, pada dasarnya pendidikan karakter yang baik menghasilkan pribadi yang berintelektual.

Ada empat prinsip yang digunakan untuk mengembangkan karakter pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (2010: 11-14):

1. Berkelanjutan. Artinya pendidikan karakter adalah proses pembentukan karakter yang panjang dimulai dari awal sampai akhir proses pendidikan di sekolah. Mulai dari tingkat TK hingga SMA. Di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pendidikan karakter lebih berfokus pada pemberdayaan.
2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya pendidikan. Artinya proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran di sekolah, setiap program ekstrakurikuler, dan program co-kurikuler berdasarkan Standar Isi Kurikulum.
3. Nilai tidak tertangkap atau diajarkan, hal itu dipelajari (Hermann, 1972). Ini berarti nilai karakternya bukan bahan ajar, tetapi ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari

oleh siswa. Para siswa adalah subyek belajar. Oleh karena itu, guru tidak perlu mengubah materi ajar namun memberi kesempatan dan kemungkinan kepada siswa untuk belajar dan menginternalisasi pendidikan karakter.

4. Proses belajar yang aktif dan menarik. Artinya, proses pendidikan karakter menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Suasana belajar seharusnya hidup, aktif, dan menarik.

Dari empat prinsip tersebut merupakan penunjang pendidikan berbasis karakter, oleh karena itu pendidikan karakter mempunyai tahapan-tahapan tersendiri, guna membentuk karakter pada diri seseorang, memang tidak gampang mendidik karakter seseorang tetapi jika dilakukan secara perlahan-lahan pasti akan berhasil.

Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan dilingkungan sekolah saja, tetapi juga dilakukan dilingkungan keluarga, karena keluarga merupakan tempat pertama terbentuknya karakter seseorang. Orang tua mempunyai peran penting dalam perkembangan dan tumbuh kembang pada seorang anak. Orang tua harus mengarahkan dan memperhatikan anak agar tumbuh sebagai pribadi yang mandiri, berperilaku yang baik, serta dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.

Implementasi pendidikan karakter pada keluarga dan didalam kehidupan sehari-hari diantaranya ialah mengerjakan shalat 5

waktu bersama keluarga, berkomunikasi dengan anak dan meminta selalu mengatakan sebenarnya, bersosialisasi dengan banyak orang dari berbagai macam perbedaan latar belakang, mengajarkan anak untuk mengerjakan setiap tugasnya.

Dalam islam pendidikan karakter itu sangat penting karena pada dasarnya hakikat pendidikan islam mempunyai peran untuk menumbuhkan potensi fitrah manusia, memberdayakan akal fikiran agar tidak terbelakang, membentuk akhlak karimah, membina generasi kepemimpinan yang adil dan bijaksana, pendidikan islam lebih mengedepankan mendidik karakter kepemimpinan dimana setiap orang akan menjadi pemimpin dimuka bumi ini setidaknya bisa memimpin dirinya sendiri. Maka kita harus menyiapkan generasi yang berakhlak mulia, beriman dan mempunyai potensi intelektual yang tinggi. Allah SWT telah memperingatkan agar tidak menjadi generasi yang lemah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ذُعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya :

*Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan*

*terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwah kepada allah dan mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-nisa' : 9).*

Makna dari ayat tersebut kita tidak boleh lemah dalam hal pengetahuan, mendidik anak, ilmu agama, dan materi (harta benda).oleh sebab itu kita sebagai manusia dianjurkan untuk lebih mencari ilmu sebanyak mungkin karena ilmu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari semua aktivitas yang kita lakukan itu semua ada ilmunya. Jangan sampai generasi kita terlantar tak terurus karena kita tidak punya ilmu untuk mendidik generasi kita kelak. Dalam mendidik generasi kita diperlukan nilai-nilai islam guna membangun karakter yang mempunyai kepribadian berjiwa pemimpin, mandiri dan sesuai dengan dasar agama.

Jadi pendidikan karakter sangat penting dalam dunia pendidikan, dimana pendidikan karakter mempunyai peran dalam perkembangan pola pikir manusia. Kemajuan negara atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan pada suatu negara tersebut, ada baiknya jika kita sadar bahwa pendidikan itu sangat penting yang itu tidak hanya di bangku sekolah atau perkuliahan saja tetapi dimana dengan siapapun, dengan apapun kita dapat memperolehnya.

## Membumikan Kembali Konsep Pendidikan Berbasis Adab

Thoriq Kemal

Jika berbicara tentang pendidikan, maka ia memiliki makna yang sangat luas. Secara umum kita mendengar bahwa pendidikan adalah usaha untuk menjadikan seseorang yang belum baik menjadi lebih baik lagi, atau boleh dikatakan pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pendidikan hanyalah sebatas definisi singkat seperti itu? Lantas kalau objek kita manusia adalah dengan memanusiakan manusia, maka jika itu hewan maka bisa dikatakan pendidikan terhadap hewan adalah menghewangkan hewan?. Apakah seperti itu? Saya rasa bukan seperti itu maksud dari pendidikan itu sendiri. Karena ini adalah artikel yang terbilang harus ilmiah, maka pendapat yang ada haruslah *by data* dan bukan hanyalah sekadar asumsi atau omongan orang saja.

Konteks pembahasan disini adalah berkaitan dengan pendidikan Islam. Ali Mufron mengatakan bahwa pendidikan berasal dari beberapa kata dari bahasa Arab. Pertama, pendidikan berasal dari kata *Tarbiyah*. Istilah *Tarbiyah* diambil dari kata *rabba-yurabbi* (رب-يرب).

Pengertian *tarbiyah* yang paling luas dan universal diutarakan oleh Abdurrahman An-Nahlawi yaitu menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa. Fadhil Al-Jamali mengatakan bahwa *tarbiyah* adalah menyetarakan antara potensi anak didik dengan fitrah (kemampuan dasar). Jika disimpulkan, *tarbiyah* atau pendidikan islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

### **Tujuan Pendidikan Islam**

Jika kita berpacu pada sistem pendidikan nasional kita, yaitu UU no. 20 tahun 2003, tujuan dari pendidikan adalah “Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertkawa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tujuan tersebut tidak jauh berbeda dari pendidikan Islam yaitu menjadikan manusia sebagai abdi atau hamba Allah dengan meneladani Rasulullah Saw, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, gemar mempelajari segala yang bermanfaat

baginya dalam merealisasikan tujuan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Secara ringkas, tujuan umum pendidikan Islam membina peserta didik agar menjadi hamba yang suka beribadah kepada Allah Swt. Ibadah dalam konteks ini tidak hanya pada permasalahan ibadah *mahdhoh* saja seperti salat, zakat, puasa, dan haji saja. Namun ibadah disini adalah mencakup seluruh amalan, pikiran atau perasaan manusia yang semuanya dihadapkan kepada Allah semata.

### **Konsep Pendidikan Berbasis Adab.**

Beberapa waktu lalu, saya mengikuti sebuah perkuliahan yang diampu oleh salah satu dosen yang sangat disegani di prodi PAI. Seperti biasanya pada saat perkuliahan selalu dengan sesi presentasi makalah yang dikerjakan secara berkelompok. Pada saat teman saya, sebut saja cak Fulan melakukan presentasi, tiba-tiba dipotong oleh dosen saya. Beliau mengomentari makalah cak Fulan ini, tapi bukannya merasa bersalah tapi ia malah balas *nyeloteh* ke dosen saya. Saya dan beberapa teman saya tertawa, karena ia *nekat* melakukan hal itu. Saya pun berkomentar bahwa pendidikan kita saat ini sudah jauh dari nilai-nilai adab terhadap guru.

Namun yang menjadi permasalahan adalah di dalam perguruan tinggi sendiri, yang namanuya penekanan terhadap

adab dan akhlak mulia sudah mulai berkurang. Pendidikan dan pengajaran sendiri hanyalah sebuah proses pentransferan ilmu pengetahuan saja. Boleh jadi fungsi guru sudah tidak sesuai dengan fitrahnya yaitu menanamkan nilai-nilai adab, kalau pun demikian apa bedanya guru dengan Google atau Wikipedia? Dan kampus yang bernuansa Islam, yang seharusnya sebagai contoh terhadap penerapan nilai-nilai akhlak namun realitanya segala sesuatu hanya diukur dengan nilai dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Lantas apa bedanya kita dengan orang-orang Eropa? Mereka hanya lebih mementingkan akal dan fungsi rasio, sedangkan nilai moral hanya sebagai mitos. Dan boleh saya berpendapat bahwa nilai-nilai adab perlu diajarkan hingga akhir hayat bukan hanya pengetahuan kognitif.

Dalam permasalahan adab dalam menuntut ilmu kepada guru, Syaikh Al-'Utsaimin berkata, "Setiap penuntut ilmu wajib menghormati ulama dan memuliakan mereka, berlapang dada ketika berbeda pendapat di antara ulama dan selain mereka serta memaklumi orang yang menempuh jalan yang salah dalam *i'tiqad* mereka". Dari sini dapat diketahui bahwa betapa pentingnya menghormati seorang guru ketika menuntut ilmu, dan itu sudah merupakan

Konsep adab yang kami tawarkan berdasarkan teori dari Adian Husaini dalam bukunya, "*Pendidikan Islam: Mewujudkan*

*Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045*”, ada 3 konsep penting dalam pendidikan berbasis adab yaitu mendidik adab dari keluarga, adab dalam pendidikan sains, dan menjadi guru beradab.

### 1. Mendidik Adab Dari Keluarga

Adab merupakan bentuk ketauhidan dan pengesaan kepada Allah Swt. Karena itu kita tidak boleh menyekutukan Allah dan tidak menyamakan sifat-sifat-Nya dengan makhluk-Nya. Selain itu, kita juga harus membentuk adab kita kepada rasul-Nya yaitu Muhammad Saw. Sebagai konsekuensinya, maka bentuk adab kepada Rasulullah adalah dengan menghormati, mencintai, dan menjadikannya sebagai suri teladan. Setelah beradab kepada Rasulullah, maka selanjutnya adalah membentuk adab kepada ulama. Karena ulama merupakan pewaris para Nabi.

Islam memandang mulia terhadap ilmu, karena ia sebagai sarana untuk mengenal Allah Swt. Ilmu juga sebagai jalan satu-satunya untuk meraih adab. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa, “Orang yang mencari ilmu dengan niat yang salah yaitu hanya mengharapkan keuntungan duniawi dan pujian manusia, maka sama menghancurkan agama”. Karena begitu mulianya kedudukan ilmu dalam Islam, maka seorang yang beradab tidak akan menyia-nyiakan umurnya untuk menjauhi ilmu atau mengejar ilmu yang tidak bermanfaat.

Oleh karena itu, keluarga merupakan “sekolah pertama” dalam proses penanaman adab terhadap anak atau peserta didik. Orang tua merupakan guru pertama bagi anak, dan keduanya wajib mengusahakan pendidikan bagi anak agar mereka menjadi beradab dengan mengenal Allah dan tidak menyekutukan-Nya.

Orang tua juga wajib mengenalkan anak kepada rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw. Karena beliau merupakan manusia yang paling mulia dan wajib dijadikan sebagai suri teladan bagi umat Islam. Sejak dini, anak harus dikenalkan pada misi utama Nabi Muhammad Saw yaitu mengenalkan siapa Tuhan mereka, apa itu Islam, dan bagaimana kita menjadi muslim yang baik.

## 2. Adab Dalam Pendidikan Sains

Islam memandang mulia terhadap kedudukan ilmu pengetahuan karena ia sebagai sarana untuk mengenal Tuhan, agama, dan kebenaran. Dalam pendidikan sains, adab seharusnya meletakkan fenomena alam pada tempatnya yaitu sebagai ayat-ayat Allah. Contohnya seperti pada objek manusia sendiri, ia bukan semata-mata objek yang terlepas dari nilai ketuhanan. Maka saat melakukan pengamatan atau penelitian terhadap suatu objek, peneliti harus memahami bahwa segala sesuatu itu terjadi tidak terlepas dari Sunnatullah. Dengan sikap seperti itu, ia akan sampai pada kesadaran, sebagaimana tertulis dalam Q.S. Ali Imran:191, “Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan semua

ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka jauhkanlah dari api neraka”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang salah satu ciri cendekiawan muslim atau bisa dikatakan sebagai *ulul albab*. Yaitu mereka yang memperhatikan fenomena alam semesta, penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam. Fenomena tersebut tidak hanya dilihat secara empiris atau inderawi semata, namun penglihatannya juga melibatkan dimensi metafisika bahwa semuanya adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah.

Dengan memahami fenomena alam sebagai ayat-ayat Allah, maka seorang ilmuwan tidak akan bersikap sombong, angkuh, dan merasa dirinya serba bisa. Ilmuwan yang sampai pada pemahaman kepada Sang Pencipta, akan senantiasa berikap rendah diri bahwa ilmu yang didapat merupakan karunia dari Allah Swt.

Dan begitulah bagaimana seorang ilmuwan atau intelektual seharusnya bersikap sesuai dengan prinsip Islami, yaitu memandang fenomena alam ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bukan sekadar objek untuk dieksploitasi dengan menempatkan manusia sebagai pengatur segalanya dan lupa bahwa ada yang lebih berkuasa dari dirinya. Dengan mengajarkan sains secara islami inilah diharapkan mampu

membimbing para calon ilmuwan untuk mengenal Allah dan menjadikan mereka manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan UU no. 20 Tahun 2003.

### 3. Menjadi Guru Beradab

Setelah saya baca buku yang ditulis oleh Dr. Adian Husaini ini, terkesan sangat kuno sekali dan bahkan bisa dibilang “Untuk apa dipertahankan?”. Namun kekunoan ini justru sangat penting dan perlu ditekankan pada zaman modern ini. Karena saya yakin para pembaca juga merupakan calon guru-guru PAI yang akan mengajarkan nilai-nilai islami kepada peserta didiknya. Dalam pembahasan ini akan kami rangkum bagaimana sikap pengajar dalam proses pengajaran dan terhadap peserta didiknya yang kami rangkum menjadi 10 poin.

- a. Dalam mendidik para muridnya, hendaknya seorang pengajar berniat karena Allah dan menyebarkan ilmu, menghidupkan syiar agama, dan menegakkan kebenaran.
- b. Hendaknya ia menegur kepada para peserta didik yang kurang beradab dalam kelasnya.
- c. Hendaknya ia bersikap adil dalam menyampaikan materi pelajaran dan memperlakukan semua peserta didik secara wajar.

- d. Hendaknya ia tidak putus asa dalam mendidik para muridnya yang menyimpang.
- e. Hendaknya ia memilih metode mengajar yang paling mudah diterima oleh peserta didiknya dan menyenangkan bagi mereka.
- f. Hendaknya ia mencintai muridnya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.
- g. Hendaknya ia tidak membebani peserta didiknya di luar kemampuannya.
- h. Hendaknya ia memperhatikan secara cermat perkembangan akhlak peserta didik dan memberikan solusi jika mereka menyimpang.
- i. Hendaknya ia selalu membantu muridnya dalam keadaan apapun.
- j. Hendaknya ia selalu bersikap rendah diri terhadap peserta didiknya.

# Kebijakan Pendidikan Karakter

Evi Nur Cahyani

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*).Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian, kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*) namun istilah-istilah

tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 2009: 107-108).

Kebijakan pendidikan menurut (Riant Nugroho, 2008: 37) sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan.

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga dijelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Menurut Sjarkawi seperti yang dikutip (Doni Koesoema, 2011: 79-80) secara umum, kita sering mengasosiasikan istilah karakter dengan apa yang disebut dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dengan konteks lingkungan. Kita juga bisa memahami karakter dari sudut pandangan behavioral yang menekan unsur somatopsikis yang dimiliki individu sejak lahir. Di sini istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian, kepribadian dianggap sebagai “ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.

Pendidikan karakter adalah keseluruhan dinamika relasional antara pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi tersebut semakin dapat menghayati kebebasan sehingga dapat bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka (Doni Koesoema, 2011: 123).

Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang menyeluruh agar orang-orang memahami, peduli, berperilaku sesuai nilai-nilai etika dasar. Dengan demikian objek dari pendidikan karakter adalah nilai-nilai. Nilai-nilai ini dapat melalui proses internalisasi dari apa yang diketahui, yang membutuhkan waktu sehingga

terbentuklah pekerti yang baik sesuai dengan nilai yang ditanamkan. (Nurul Zuriah, 1997:38). Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai hidup yang merupakan realitas yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Sudrajat (2010), pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “*The deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development.*” Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah atau lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.

Upaya sekolah dalam pembentukan karakter siswa adalah dengan cara mengintegrasikan ke dalam kurikulum, ekstrakurikuler maupun pembiasaan baik di sekolah,

pengintegrasian pendidikan karakter di dalam kelas guru mengupayakan metode yang relevan sehingga akan tercipta belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan sehingga berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Disinilah yang akan menjadi objek penelitian, penerapan kebijakan pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

Berakar dari kebijakan pemerintah yang mencanangkan kebijakan pendidikan karakter di sekolah, dimana setiap sekolah menerapkan pendidikan karakter, dengan demikian seluruh komponen sekolah dalam hal ini kepala sekolah beserta guru dapat menciptakan suasana dalam proses pembelajaran yang mengembirakan dan memotivasi siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar dan lebih mendisiplinkan diri. Kondisi ini tentunya akan meningkatkan peluang bagi siswa bersangkutan mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi dari pada sebelumnya, ketika mereka malas, tidak disiplin, dan cepat putus asa. Penerapan pendidikan karakter di sekolah pastinya tidak akan lepas dari berbagai hambatan yang harus dihadapi para guru. Guru sebagai pelaksana kurikulum dituntut untuk mengetahui dan bisa menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapinya sehingga proses penerapan pendidikan karakter di sekolah dapat terlaksana secara optimal.

# **Islam Dan Pancasila Sebagai Basis Pendidikan Karakter di Indonesia**

Thoriq Kemal

Dalam konteks masyarakat Indonesia, Islam dan Pancasila masih diperdebatkan apakah masih ada kesinambungan antara keduanya. Seperti pada kasus pembentukan ideologi negara kita dimana antara kaum nasionalis dan agama memperdebatkan prinsip apakah negara kita akan menjadi negara Islam atau negara sekuler? Memang, negara kita mayoritas penduduknya adalah masyarakat Muslim namun tidak semuanya masyarakat kita beragama Islam. Dalam polemic pembentukan ideologi negara akhirnya terbentuknya konsep Pancasila dengan lima silanya yang berawalan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakhir dengan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada awal kemerdekaan Indonesia kalangan Islam ada yang tidak sepakat dengan adanya Pancasila sehingga mereka ingin mendirikan sebuah negara baru berasaskan Islam seperti DII.

Pancasila sendiri telah mengalami dinamika sejarah yang cukup panjang hingga mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Soeharto, dimana Pancasila dijadikan doktrin sekaligus asas tunggal dalam pemerintahannya. Bukan hanya

rakyat perseorangan atau individu yang harus menghayati serta mengamalkannya, namun seluruh organisasi dan pergerakan harus memakai Pancasila sebagai ideologinya.

Membahas tentang pendidikan karakter memang tiada habisnya, banyak sekali wacana yang digaungkan demi kemajuan pendidikan terutama di Indonesia. Dalam artikel yang singkat ini, kami akan menguraikan sedikit tentang relasi pendidikan karakter Islam dengan Pancasila.

### **Lahirnya Pancasila**

Sebelum masa kemerdekaan, ada satu hal yang menjadi keresahan bapak pembangun bangsa kita pada saat itu adalah ideologi negara. Karena ia sangat penting bagi masa depan dan keberlangsungan hidup pada suatu bangsa. Selain itu, ideologi juga berfungsi sebagai identitas nasional serta sebagai motor penggerak dalam mencapai perjuangan cita-citanya. Apabila suatu bangsa tidak memiliki ideologi yang jelas, maka tidak jelaslah tujuan yang akan dicapai kelak.

Menjelang proklamasi kemerdekaan, para wakil dari fraksi nasionalis muslim dan netral agama memperdebatkan mengenai berbagai masalah penting tentang ideologi negara Indonesia kelak. Seperti menggunakan dasar filosofis apa untuk menampung aspirasi dari berbagai golongan? Dan ideologi

nasional seperti apakah yang akan diterapkan demi terjaganya stabilitas nasional?. Selain itu juga dipertanyakan, apakah Indonesia akan menjadi negara sekuler atau negara Islam?. Akhirnya permasalahan ini dibicarakan dalam suatu sidang yang diberi nama BPUPKI.

BPUPKI dibentuk pada tanggal 24 April 1945, namun baru dikukuhkan secara resmi oleh pemerintah Jepang pada tanggal 28 Mei 1945. Pelaksanaan sidang ini di Gedung Pejambon, Jakarta, dengan beranggotakan 68 orang yang kebanyakan dari fraksi nasionalis. Dalam sidang ini ada beberapa pembahasan seperti bentuk negara, batas-batas wilayah, konstitusi, dan dasar negara.

Pada pembahasan pertama berkaitan dengan bentuk negara, mayoritas memilih Indonesia sebagai negara republik. Kemudian pada pembahasan ideologi negara, beberapa tokoh mengemukakan konsepnya masing-masing. Muhammad Yamin merumuskan lima sila sebagai negara yaitu: Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketuhanan, Perikerakyatan, dan Kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Soekarno memberikan rumusan yang dikenal sebagai lima sila atau Pancasila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

Pada tanggal 22 Juni 1945, akhirnya dibentuklah sebuah rumusan ideologi negara yang masih bersifat “sementara” dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam tersebut terdiri dari 5 poin, yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam ini merupakan hasil kerja dari sebuah panitia kecil yang dikenal dengan panitia sembilan. Anggotanya terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosuroso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Anak kalimat nomer satu ini dinilai strategis karena terdapat juga dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Bagi kaum nasionalis muslim, anak kalimat ini sangat penting karena dengan itu tugas pelaksanaan syariat Islam secara konstitusional akan terbuka pada masa yang akan datang.

Tetapi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada pihak yang tidak setuju dengan poin pertama yaitu kalangan Kristen di wilayah Indonesia bagian Timur. Mereka mengancam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia apabila Piagam Jakarta tersebut masih dijadikan sebagai ideologi resmi negara. Maka untuk mengatasi ancaman tersebut, Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan agar anak kalimat nomer satu dihapus. Dan kemudian usulan tersebut disepakati lalu bergantilah menjadi kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, Piagam Jakarta tersebut dihapuskan dan diganti dengan ideologi tetap kita yang dikenal sebagai Pancasila.

#### **Indoktrinasi Pancasila dan P4**

Orde Baru merupakan zaman peralihan dari Orde Lama pemerintahan Sukarno ke pemerintahan Soeharto. Pada era ini, penekanan terhadap Pancasila lebih “tegas” daripada era Orde Lama. Pada masa Sukarno, Pancasila ditafsirkannya sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipol/USDEK. Ia menggunakan payung Pancasila sebagai upaya perwujudannya dalam mengayomi 3 ideologi yang dikenal sebagai Nasakom (Nasionalis, Islam, Komunis).

Dan ketika kekuasaan diambil sepenuhnya oleh Soeharto yang kemudian hari menjadikan dirinya sebagai presiden Republik Indonesia, ia melakukan penekanan agar Pancasila dijadikan sebagai pegangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1967, ia menyatakan bahwa karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup atau *worldview* yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa “Kita mengagungkan Pancasila bukan sekadar karena ia ditemukan kembali dan dirumuskan oleh seseorang dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya dan juga telah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Dengan berpegang teguh kepada Pancasila, maka persatuan dan kesatuan bangsa telah mampu kita pertahankan baik dalam menghadapi bahaya musuh dari luar maupun menghadapi segala bentuk pemberontakan dari dalam”.

Soeharto juga memberikan pernyataan secara tegas bahwa “Pancasila bukan milik suatu golongan atau perorangan, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita dengan tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah wujud

kepribadian seluruh bangsa Indonesia. Karena itu setiap usaha merenggutnya dari bangsa ini pasti akan mendapat perlawanan yang hebat dan berakhir dengan kegagalan”.

Selanjutnya pemerintahan memberikan pedoman Pancasila yang dikenal sebagai P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). P4 sebagai penjabaran Pancasila mengandung 45 butir nilai, ada yang berpendapat bahwa ia memiliki 36 nilai, yang berasal dari gagasan presiden Soeharto dan juga dalam TAP MPR No. II tahun 1978. Sila pertama Ketuhanan terdiri dari 7 butir, yaitu (Ismail, 2017:175):

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda keyakinan.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua yang berbunyi, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” terdiri dari 10 nilai:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan *tepa selira*.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap saling menghormati

Dalam sila ketiga “Persatuan Indonesia, dijabarkan menjadi 7 nilai yang terdiri dari:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dijabarkan menjadi 10 nilai, yaitu:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta

mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terdiri dari 11 nilai, yaitu:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dari paparan di atas, pemerintah sudah sangat bagus dalam membumikan Pancasila sebagai pegangan hidup masyarakat Indonesia pada saat itu, tetapi pemerintah Soeharto juga getol dalam melakukan penumpasan bagi organisasi, khususnya organisasi politik, yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila seperti paham Sosialisme, Komunisme, bahkan Islam.

Menurut Martin Van Bruinessen, program indoktrinasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan pertanyaan terutama umat Islam. Sebagian bahkan mencurigai indoktrinasi ini bertujuan untuk melemahkan Islam dan ideologi-ideologi lainnya.

NU yang berafiliasi dengan PPP tidak setuju dengan adanya program P4 ini dikarenakan dalam pasal GBHN, karena pemerintah menganggap agama Islam sama dengan agama lain. Mereka akhirnya melakukan protes terhadap pemerintah dengan melakukan *walk out* di saat persidangan MPR yang pada saat itu akan merumuskan program P4.

Tindakan ini akhirnya menimbulkan kemarahan terhadap presiden Soeharto sehingga ia menginstruksikan agar seluruh organisasi harus berasas Pancasila, bagi yang tidak menggunakan asas tersebut dianggap sebagai organisasi

terlarang. Angkatan bersenjata, jika perlu, harus turun tangan untuk menumpas pergerakan yang dianggap “terlarang” oleh pemerintah.

Dengan adanya intruksi ini, organisasi Islam seperti HMI harus mengubah AD/ART nya yang semula mencantumkan Islam dan Pancasila harus menghapuskan kata Islam. Organisasi Islam lain juga harus menghapuskan Islam dan menggantinya dengan Pancasila.

Indoktrinasi Pancasila terhadap organisasi dan pergerakan masih terus bertahan hingga digulingkannya Soeharto pada tahun 1998. Saat pemerintahan Soeharto tumbang, masyarakat mulai muncul fobia terhadap Pancasila dan untuk sementara waktu dilupakan sejenak karena selalu identik dengan orde baru.

Dengan dikesampingkannya Pancasila serta nilai-nilainya, masyarakat mulai kehilangan jati dirinya dan menimbulkan dampak yang fatal. Dalam kehidupan sosial misalnya, masyarakat kehilangan kendali atas jati dirinya sehingga terjadilah konflik dimana-mana yang menyebabkan timbul perpecahan. Selain itu dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas nilai luhur akan kebudayaan Indonesia mulai

luntur yang mengakibatkan mereka lebih suka berkiblat pada negara lain.

Namun kemudian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia dicantumkan dalam TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”. Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas digalakkan untuk menosialisasikan Pancasila sebagai ideologi negara, UU Nomor 12 tahun 2011 menegaskan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Pendidikan Karakter Berbasis Islam dan Pancasila**

Seperti halnya anak-anak lainnya, kami pernah merasakan sekolah dan mendapatkan materi Pembelajaran dari lembaga pendidikan tersebut. Tapi ada satu hal yang bikin saya bingung,

kenapa pelajaran Pancasila atau PPKN itu dibedakan dengan Pendidikan Agama? Bukankah dalam 5 poin yang tertera dalam Pancasila itu dicantumkan juga dalam Al-Quran? Seharusnya ada. Bahkan poin-poinnya bisa dipakai sebagai acuan oleh ideologi lain seperti halnya Komunisme, Sosialis, Liberal, dan agama non Islam pun Pancasila juga memiliki kesinambungan. Jika pada zaman Orde Baru penafsiran terhadap Pancasila mutlak milik pemerintah, pada era sekarang konsep penafsiran terhadap Pancasila bisa diramu oleh berbagai kalangan terutama cendekiawan. Dan ini juga sebagai penekanan bahwa antara Islam dan Pancasila tidak bertentangan, melainkan berkesinambungan.

Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu karakter? Dan apa urgensi karakter terhadap pendidikan?. Jika ditinjau dari pengertiannya, Thomas Lickona mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti. Sedangkan menurut Ramli (2003), pendidikan karakter mempunyai esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan akhlak. Menurutnya, tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk pribadi peserta didik agar menjadi manusia yang baik. Singkatnya, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak baik, toleran, berjiwa patriotik, memiliki orientasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai prinsip

Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. (Muammar, 2019:8).

Lantas, mengapa penanaman karakter tidak hanya berdasarkan Islam saja? Apakah bisa kita tanamkan pemahaman Islam dan Pancasila kepada peserta didik? Jawabannya tentu saja bisa. Kami memiliki sebuah saran agar dalam pelajaran pendidikan Islam kita, di sisi lain mengajarkan konsep keislaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad Saw, juga perlu menanamkan nilai karakter yang sesuai dengan pilar-pilar Pancasila dan melakukan penguatan kembali akan cinta tanah air atau nasionalisme.

Mungkin kita telah mengetahui gerakan-gerakan fundamentalisme Islam yang menolak konsep nasionalisme, tetapi mereka mengharuskan untuk menegakkan syariat Islam atau khilafah. Gerakan ini dinamakan Hizbut Tahrir. Gerakan ini pertama kali muncul di Yerusalem pada tahun 1953 yang didirikan oleh Taqiyyudin An-Nabhani. Menurut Haedas Nashir, awal kemunculannya di Indonesia sekitar tahun 1972 secara eksklusif atau tertutup. Pergerakan mereka semakin masif pada dekade 1990 sampai 2000an.

Agar generasi penerus bangsa kita tidak terjerumus pada kelompok Islam yang cenderung radikal, dalam hal ini guru

sebagai pengajar sekaligus pendidik perlu memberikan perhatian yang penuh terhadap peserta didik kalau pun bisa jangan hanya saat pelajaran namun juga ketika di luar jam pelajaran sekolah minimal memantaunya pada saat waktu ekstrakurikuler.

Selain itu, antara guru PAI dan Pancasila/PPKn perlu mengadakan kolaborasi tentang perlunya menanamkan nilai-nilai keislaman dan Pancasila. Contohnya seperti dalam prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Guru perlu memberikan penanaman tauhid secara benar dan utuh. Dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13 yang artinya, *“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika memberi pelajaran kepadanya, ‘Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan-Nya merupakan kedzaliman yang besar.’* Dalam ayat ini, prinsip tauhid merupakan hal yang paling penting dalam pendidikan kepada anak/peserta didik. Seperti halnya Pancasila, prinsip ketuhanan tidak hanya mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa, namun prinsip-prinsip lainnya seperti penghormatan dan toleransi terhadap kawan yang berbeda keyakinan serta tidak memaksakan orang lain untuk mengimani apa yang kita Imani.

Selain prinsip ketuhanan, kami menekankan terhadap aspek kemanusiaan dan keadilan sosial pada pendidikan karakter ini. Seperti yang dicetuskan oleh Nurcholish Madjid dalam bukunya

*“Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan”*, bahwa sistem ekonomi yang bersifat kapitalistik sangat dikutuk keras dalam Islam. Dalam Al-Quran seperti Q.S. At-Takatsur, Allah mengutuk orang yang bermegah-megahan dan mencintai hartanya secara berlebihan karena ia akan lalai terhadap kematian (Q.S. At-Takatsur: 1-2). Dan Allah juga mengutuk orang yang senang mengumpulkan harta tanpa mau menyantuni anak yatim atau membagikannya kepada orang miskin. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk berinfaq di jalan Allah dan menunaikan zakat agar prinsip keadilan sosial bisa tercapai.

Sebagai penutup, marilah kawan janganlah kita mengaku sebagai seorang Pancasila karena telah menghafal kelima sila tersebut, namun kita juga perlu menghayati falsafah dan nilai-nilai yang ada dalam setiap sila itu. Maka kami setuju dengan pernyataan Cak Nur tersebut, “Sedangkan yang amat kita perlukan sekarang ialah Pancasila yang berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Pemfungsian atau lebih tepatnya “penyalahgunaan” Pancasila seperti itu adalah akibat persepsi yang reaktif terhadap Pancasila. Dengan persepsi reaktif itu kita lebih tahu tentang apa yang bukan Pancasila, namun sedikit sekali kita mengetahui apa itu Pancasila. Apalagi sikap kita yang terlalu apologetik saat kita hendak membicarakan perwujudan nyata dalam masyarakat untuk sila-sila Perikemanusiaan, Kerakyatan,

dan Keadilan Sosial. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan diri terus-menerus bersikap “tiba di mata dipejamkan, tiba di perut dikempiskan” terhadap nilai-nilai Pancasila itu. Karena itu, diperlukan sikap yang lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila itu, yaitu usaha mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan “pengusutan” kepada keadaan sekarang. Di sini berarti dikehendakinya adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ke sanalah muara konvergensi nasional kita, nilai keindonesiaan kita”. *Wassalam.*

# Tarbiyah Al Nubuwwah sebagai Basis Pendidikan Indonesia

Evi Nur Cahyani

Posisi pendidik dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan berada di garda terdepan. Tanpa keberadaan pendidik, proses pendidikan tidak berarti apa-apa. Untuk mewujudkan pendidik profesional berdasarkan ruh-Islam, perlu melihat sisi kehidupan atau profil Rasulullah sebagai pendidik ideal dan sebagai manajer ideal dalam mengelola pendidikan, karena hakikat diutusnya Rasulullah ke atas muka bumi adalah sebagai *uswatun hasanah* dan *rahmat lil-‘ālamīn*. Karena itu, tulisan ini akan mengungkapkan gambaran pendidikan Islam pada era Rasulullah SAW dan konsep pendidik ideal dalam pendidikan Islam.

Sebuah lembaga pendidikan tidak bisa beroperasi tanpa pendidik. Wajar kalau ada istilah yang mengatakan, *‘Al-tharīqat ahammu min al-māddat, wa lākin al-mudarris ahammu min al-tharīqat’* (Metode pembelajaran) lebih penting dari materi (belajar), akan tetapi peranan guru (dalam proses belajar-mengajar) jauh lebih penting daripada metode pembelajaran itu sendiri.

Banyak pemahaman yang keliru tentang keberadaan tugas dan tanggung jawab pendidik di tengah-tengah umat, terutama pendidik dalam pendidikan Islam. Banyak pendidik yang menganggap dirinya hanya sebagai pengajar di sekolah dalam wujud *transfer of knowledge*, sekadar hadir di sekolah mengisi daftar hadir. Padahal pendidik bukan saja bertugas untuk mentransfer dan mentransformasikan ilmu pengetahuan terhadap peserta didik, akan tetapi pendidik semestinya merealisasikan fungsi, tugas dan kedudukannya sebagai *murabbī*, *mu'allim*, *mu'addib*, *muzakkī*, *mudarris*, *mursyid*, *mutlī*, dan, *ustād*z sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Sebagai pendidik ideal, Rasulullah SAW memiliki kepribadian. Kepribadian di sini dimaksudkan sebagai sifat-sifat mental dan akhlak Rasūlullāh SAW yang penekanannya kepada akhlak batin. Akhlak batin tersebut terlihat dari aktivitas dan sikap Rasūlullāh SAW dalam menghadapi berbagai persoalan dan menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Secara umum, Ibnu Sa'd menjelaskan secara rinci tentang akhlak Rasūlullāh SAW di dalam buku yang ditulisnya berjudul *a-Thabaqāt al-Kubrā*. Di dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana kepribadian beliau sebagai manusia terbaik yang semua aktivitasnya tidak lepas dari implementasi al-Qur'ān dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disebut sebagai al-Qur'ān

berjalan. Anas mengatakan, bahwa Rasūlullāh SAW adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Ketika ‘Āisyah ditanya tentang akhlak Rasūlullāh SAW di rumah, ia berkata, Rasūlullāh SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, dia tidak mau mencela, dan tidak mau berteriak di pasar-pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan serupa dengannya. Bahkan beliau adalah pemaaf dan lapang dada. ‘Abdullāh bin Umar mengatakan, Rasūlullāh SAW tidak pernah berbuat keji. Zaid bin Tsābit mengatakan, Rasūlullāh SAW adalah manusia yang paling lembut dan mulia, beliau juga suka senyum. Apabila tiba waktu salat dia keluar rumah menuju masjid untuk melaksanakan salat. Beliau juga bekerja di rumah, seperti menjahit pakaiannya dan memperbaiki sandalnya. Melakukan kegiatan rumah tangga, seperti yang dilakukan umumnya orang lain. Rasūlullāh SAW apabila dipilhkan dengan dua pilihan, maka beliau memilih yang termudah, selama tidak mendatangkan.

Tidak dapat dipungkiri dalam pandangan Islam menempatkan Rasulullah SAW sebagai pendidik ideal. Ia dianggap telah sukses menjalankan misi propetik di bidang pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik ideal. Berdasarkan riset yang ditelaah dilakukan ada beberapa kontribusi kajian terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia sebagai berikut:

## a. Pemantapan Kedudukan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kajian ini menyumbangkan pokok pemikiran akan perlunya membenahi Materi Pendidikan Agama dengan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW. Adapun di antara sifat-sifat terpuji yang seharusnya dimuat dalam materi Pendidikan Agama Islam adalah: (1) Jujur (*al-shidq*), yaitu benar dalam berbuat; (2) Adil (*al-'adl*), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya; (3) sabar (*al-shbar*), yaitu tahan dalam menghadapi berbagai cobaan; (4) terpercaya (*al-amānat*), yaitu menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh kesungguhan, tidak menyia-nyiakan kepercayaan rakyat; (5) cerdas (*al-dzakā*), yaitu mampu menghadapi berbagai rintangan dengan cara-cara yang berilian; (6) berani (*al-syujā'*), yakni tidak takut membela kebenaran meski banyak musuh yang siap menantang; (7) teguh pendirian (*al-istiqāmat*), yaitu tidak mudah goyah; (8) pemaaf (*al-'afw*), yaitu suka memberikan maaf; (9) toleransi (*al-tasāmuh*), yaitu tidak kaku dalam bertindak; (10) kuat (*al-quwwat*), yaitu kuat secara fisik dan psikis; (11) santun (*al-hilm*), yaitu sifat hormat kepada orang lain, tidak meremehkan pihak lain, dan berbuat dengan penuh hikmat dan bijaksana; (12) tegas (*al-wadhih*), mampu memberikan sanksi pada saat yang tepat, berbicara dengan jelas; (13) malu (*al-hayā'*), yaitu tidak berani berbuat maksiat yang dapat menurunkan harga diri; (14)

kasih sayang (*al-rifq*), yaitu mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri; (15) mulia (*al-karīm*), melakukan tindakan-tindakan terpuji; (16) kehormatan diri (*al-murūat*), yaitu menjaga diri agar terhindar dari perbuatan maksiat; (17) optimis (*al-tafā'ul*), yaitu keyakinan akan sukses di masa depan (18) dermawan (*al-jud*), yaitu suka memberikan bantuan kepada orang lain; (19) rendah hati (*al-tawādhū'*), tidak memandang rendah pihak lain (20) baik sangka (*al-husn al-dzhan*), yaitu suatu anggapan bahwa pada hakekatnya tidak ada orang yang ingin celaka, akan tetapi umumnya manusia ingin yang terbaik; (21) humor (*al-mazī'at*), yaitu sifat suka memberikan hiburan di tengah keramaian asalkan tidak menyalahi aturan Ilahi; (22) ilmu (*al-'ilm*), yaitu suatu kemampuan yang dimiliki tentang hakekat sesuatu, sehingga jelas baginya antara kebenaran dan kebatilan; (23) penyampai (*al-tablīgh*), yaitu suatu sifat pemimpin yang gemar menyampaikan perkara agama Islam kepada umat.

## b. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kurikulum dan standar pendidikan nasional, perlu melihat kondisi dan situasi, hal ini dapat dilihat dari kebijakan Rasulullah SAW dalam memberikan penekanan terhadap materi pendidikan di Makkah dan Madinah. Kebijakan tersebut juga hendaknya diterapkan oleh seorang pendidik ketika mengajar. Seorang pendidik hendaknya

berbicara sesuai dengan perkembangan peserta didik, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan agar berbicara sesuai dengan perkembangan psikologis seseorang. Dalam hal ini pendidik hendaknya memperhatikan perkembangan psikologis, tingkat kesulitan materi ajar, suasana pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan teknik ketika berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.

### c. Pengembangan Fungsi dan Peran Pendidik

Banyak pendidik yang mengaggap dirinya hanya sebagai pengajar di sekolah dalam wujud *transfer of knowledge*, akan tetapi pendidik semestinya merealisasikan fungsi, tugasnya sebagai *murabbī*, *mu'allim*, *mu'addib*, *muzakkī*, *mudarris*, *mursyid*, *mutlī*, dan, *ustādz*.

Konsep *murabbī*, *mu'allim*, *mu'addib*, *muzakkī*, *mudarris*, *mursyid*, *mutlī*, dan, konsep *ustādz* merupakan pengayaan bagi pengembangan tugas dan fungsi pendidik dalam pendidikan Islam di Indonesia. *Murabbiiy*, adalah orang yang bertugas untuk memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan aspek jasmani dan ruhani peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik. Sebagai *mu'allim* pendidik adalah orang yang menguasai ilmu dan mentransfer ilmu terhadap peserta didik. Sebagai *mu'addib* pendidik adalah *role of model*, teladan, dan bertugas memberikan

tugas dan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Sebagai *mursyid*, pendidik adalah orang yang mampu memberikan bimbingan, mengarahkan dan menjadi konsultan bagi peserta didiknya. Sebagai *mudarris* pendidik adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih kerampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Sebagai *muzakki*, pendidik adalah orang yang bertugas mensucikan jiwa peserta didik.

Kedudukan Rasulullah SAW sebagai pendidik ideal dalam pendidikan Islam, dapat dilihat dari peranannya yang sangat luar biasa dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikan, meskipun dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sangat sederhana, ia telah berhasil ‘menelorkan’ out out’ yang berkualitas. Dalam waktu yang relatif singkat, bangsa Arab yang pada mulanya hidup dalam kejahiliah dan kegelapan menjadi negara berdaulat, berperadaban tinggi, bahkan telah menghantarkan bangsa Arab menjadi negara adikuasa terutama pada fase awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Keperibadian Rasulullah SAW sebagai pendidik ideal dapat dilihat dari pengimplmentasian nilai-nilai yang terkandung

dalam konsep-konsep *murabbiy*, *mu'allim*, *mu`addib*, *mursyid*, *mudarris*, *muth'i*, dan *muzakkiy*.

Ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran, kondisi yang masih sangat sederhana, maka salah satu sistem pembelajaran yang diterapkan Rasulullah SAW adalah sistem halaqah, yang berlangsung di rumah, masjid, dan kuttab. Sistem halaqah adalah sistem duduk melingkar, antara peserta didik lututnya saling bersentuhan, sementara guru duduk pada posisi sentral. Sistem seperti ini bukan saja menyentuh aspek kognitif peserta didik, akan tetapi juga menyentuh aspek emosional dan spiritual, serta mengembangkan rasa solidaritas yang tinggi. Sistem halaqah juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, dialogis. Sistem pembelajaran halaqah pada akhir-akhir sudah jarang digunakan, pada hal sistem halaqah dapat mengembangkan konsep *learning how to think, know, learning how to be, learning how to do, learning how to live together, learning how to believe in God, and how learning throughout life*.

Metode pembelajaran yang diterapkan Rasulullah SAW bervariasi, sehingga dapat menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Metode yang diberikan disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik dan tingkat kesulitan materi ajar.

Rangkaian konsep-konsep profil Rasulullah SAW memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan Islam, paling tidak pada tiga aspek, 1) aspek pemantapan materi ajar pada mata pelajaran PAI, 2) kebijakan pendidikan, dan 3) pengayaan fungsi dan tugas pendidik dalam pendidikan Islam di Indonesia.

## **Gus Dur dan Pembaruan Kurikulum Pesantren**

Artikel ini pernah dimuat di Al-Ibar.net pada 3 Januari 2020

Thoriq Kemal

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang masih eksis hingga saat ini. Walau zaman terus berputar serta perkembangan teknologi sangat pesat, arus budaya luar masuk begitu bebasnya, namun ia masih bertahan dalam arus globalisasi tersebut. Tak heran jika lembaga pendidikan ini masih diminati karena sistem pembelajarannya tidak hanya berfokus pada agama dan ilmu umum saja, namun adab juga sangat ditekankan dalam lingkungan pesantren. Diharapkan setelah lulus dari pesantren, mereka mampu menjadi teladan bagi masyarakat kelak.

Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur adalah salah satu lulusan pesantren, intelektual terkemuka, Presiden keempat Republik Indonesia dan guru bangsa. Dari segi nasab, beliau termasuk keturunan ulama pendiri organisasi Nahdhatul Ulama yaitu K.H. Hasyim Asy'ari. Ayahnya merupakan menteri agama pada era pemerintahan Sukarno tahun 1950-an. Gus Dur pernah menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo dan Universitas Baghdad. Sejak muda, beliau memang senang sekali membaca buku mulai dari kitab klasik hingga buku-buku pemikiran Barat. Tak heran jika pemikiran Islamnya terkesan modernis dan liberal.

Saya mulai tertarik dengan Gus Dur karena pemikiran beliau begitu “reformis”, sebagaimana yang dituangkan dalam majalah Prisma pada dekade 70 sampai 80an. Kumpulan artikelnya disatukan menjadi sebuah buku yang diterbitkan oleh Lkis menjadi “Prisma Pemikiran Gus Dur”. Tema-tema yang ditulis dalam buku tersebut berisi tentang pembaruan tradisi keislaman, pembangunan negara, dan humanisme.

Selain itu, Gus Dur juga menulis esai-esai tentang pesantren yang dibukukan oleh penerbit yang sama dengan judul “Menggerakkan Tradisi”. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas pemikiran Gus Dur dan ide-ide pembaruannya terhadap pesantren.

### **Sejarah, Perkembangan, dan Pembelajaran Pesantren**

Istilah pesantren berasal dari kata “santri” atau pesantrian, yaitu tempat tinggal dari santri itu sendiri. Secara terminologis yang dikemukakan oleh beberapa ahli, pesantren merupakan sekolah tradisional Islam berasrama di Indonesia yang memfokuskan pada pengajaran agama dengan menggunakan metode pengajaran yang tradisional serta menekankan pada pengamalan moral keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika ditinjau dari sejarahnya, ada 3 pendapat tentang asal-usul munculnya pesantren di Indonesia. Pendapat pertama

berpendapat bahwa pesantren merupakan tradisi Islam itu sendiri, yaitu tarekat. Pesantren memiliki kaitan erat dengan pengajaran sufi yang ditandai dengan kelompok-kelompok tarekat yang melaksanakan amalan zikir dan doa tertentu dengan dipandu oleh seorang kiyai. Di samping mengajarkan tarekat, mereka juga belajar kitab-kitab agama dan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah sebuah pesantren.

Pendapat kedua mengatakan bahwa pesantren merupakan peninggalan dari umat Hindu di Indonesia. Pendirian pesantren dimaksudkan untuk digunakan sebagai wadah pengajaran agama hindu dan tempat mengkader bagi calon “dai” agama Hindu. Dan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa pesantren baru muncul sekitar abad ke-16 M. menurut Martin Van Bruinessen, pesantren merupakan pusat Pembelajaran Islam terbesar kedua setelah masjid. Dan menurutnya, awal kemunculan pesantren ini terdapat di Desa Perdikan yang terindikasi di Jawa.

Pembelajaran pesantren tidak terlepas dengan kitab kuning. Kitab kuning ibarat diktat/modul belajar bagi seorang santri di pesantren. Model pembelajaran yang dipakai dalam pesantren pada umumnya di Indonesia antara lain sorogan, wetonan, halaqoh, hafalan, dan muazakaroh.

## **Gagasan Gus Dur Tentang Kurikulum Pesantren**

Sebagai seorang santri dan memiliki kekayaan intelektual yang cemerlang dalam bidang agama, politik, dan kebudayaan, Gus Dur juga mempunyai perhatian akan pembaruan dalam pesantren, khususnya di Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul “Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren”, terdapat banyak aspek yang perlu diperbarui di dalam pesantren itu sendiri. Contohnya saja bagaimana Gus Dur mampu memposisikan kedudukan pesantren dalam kesusastraan Indonesia. Mungkin kita bingung, memang apa hubungannya pesantren dengan sastra? Pasti sangat bertolak belakang dan bisa jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Pada awal kalimatnya Gus Dur mengamini pendapat ini bahwa dalam perspektif sastra Indonesia, pesantren masih belum diminati oleh kalangan sastrawan Indonesia pada waktu itu. Menurutnya, hanya ada 2 sastrawan yang bernama Djamil Suherman dan Mohammad Radjab. Itupun mereka hanya mampu menuliskan nostalgia seputar pesantren bukan menggambarkan jiwa pesantren secara utuh. Dalam penutupnya, Gus Dur memberikan sebuah simpulan bahwa salah satu jalan untuk mengatasi kekurangan materi pesantren dalam kesusastraan Indonesia adalah dengan mencari persoalan dramatis yang mengarah pada bentuk satire.

Pada pembahasan ini Gus Dur mengkritik kurikulum pembelajaran pesantren di Indonesia pada saat itu. menurutnya, *“Sistem pendidikan di pondok pesantren masih belum memiliki kesamaan dasar di luar penggunaan buku-buku wajib (kutub Al-Muqararah) yang hampir bersamaan atau di luar materi pelajaran yang berdekatan. Keragaman ini timbul akibat dari ketidaksamaan dalam sistem pendidikannya, dimana ada pesantren dengan sistem pendidikan berupa pengajian tanpa sekolah/madrasah, ada pesantren yang hanya menggunakan sistem pendidikan klasikal, dan ada yang menggabungkan antara sistem pengajian dan sistem madrasah non klasikal. Namun, perlu ditekankan kembali bahwa tidak mungkin ada penyatuan kurikulum selama masih ada perbedaan-perbedaan yang dianut.”*

Dari masalah tersebut, Gus Dur memberikan tawaran kurikulum dengan sebab beberapa ketentuan. *Pertama*, ketentuan untuk menghindarkan pengulangan, sepanjang tidak dimaksudkan untuk pendalaman. *Kedua*, penekanan pada latihan. Dan *ketiga*, tidak dapat dihindari adanya lompatan tidak berurutan dalam diktat selama pendidikan berlangsung.

Oleh karena itu, Gus Dur memberikan tawaran kurikulum untuk pesantren di Indonesia. 1) memberikan waktu terbanyak pada unsur nahwu-sharaf dan fikih, karena kedua unsur ini perlu pengulangan, 2) mata pelajaran lain hanya diberikan selama

setahun tanpa pengulangan, dan 3) pemberian materi hadis Shahih Bukhari dan Muslim serta *Ihya' Ulumuddin* pada tahun terakhir. Beliau memetakan jangka waktu pembelajaran selama 6 tahun. Pada tahun pertama dan ketiga, santri mempelajari materi Nahwu, Fikih, Sharaf, dan Tauhid. Tahun keempat mempelajari Fikih, Balaghah, dan Tafsir. Tahun kelima Mantik, Ushul Fikih, dan Hadis. Dan tahun keenam dicukupkan pada Pembelajaran hadis dan tasawuf.

Sebagai penutup artikel ini, gagasan Gus Dur tentang pesantren lebih pada penyederhanaan kurikulum yang ada di Indonesia pada saat itu. Beliau menekankan bahwa penyederhanaan ini tidak bermaksud untuk mendangkalkan ilmu agama, melainkan dapat dimasukkan ke dalam sistem pengajaran yang lebih luas seperti pengajian agama nonkurikuler.

Kami cukupkan pembahasan tentang pemikiran Abdurrahman Wahid dalam memandang kurikulum pesantren. Diharapkan gagasan pembaruan seputar pesantren tidak hanya berhenti disitu saja, perlu ada kajian lebih luas lagi agar pendidikan pesantren tetap eksis sepanjang zaman. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Swt. semata. *Wallahu a'lam bi shawwaab.*

## **BAGIAN II**

# **GERAKAN FEMINIS**

# Gerakan Feminisme

Evi Nur Cahyani

Feminisme sebagai filsafat dan gerakan dalam masyarakat muncul sebuah kesadaran, ketika dalam sejarah manusia di dunia menunjukkan realita dimana kaum perempuan (feminim) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya.

Keadaan kaum feminim dalam kultur masyarakat serta geliat mereka untuk mendorong, mendesak dalam mendapatkan berbagai akses kehidupan inilah yang kemudian menarik untuk mengkaji proses dan perjuangan perempuan menjadi objek-objek kajian. Disinilah kemudian muncul feminisme sebagai teori. Feminisme sebagai sebuah teori gerakan sosial, memiliki sejarah yang cukup panjang. Penggunaan kata “feminisme” pertama kali oleh Charles Fourier, filsuf Prancis, tahun 1837. Istilah ini kemudian berkembang di Prancis dan Belanda tahun 1872, di Inggris Raya tahun 1890-an dan di Amerika Serikat tahun 1910. Feminisme sebagai suatu istilah yang dipahami secara keilmuan, baru dikenal sejak awal 1970-an di Indonesia, terutama sejak tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme bermunculan dalam buku, jurnal-jurnal dan surat kabar (Warsito: 2012). Sampai saat

ini, tulisan-tulisan ilmiah itu semakin banyak dan memberi sumbangan pengetahuan luar biasa kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan akademik. Menurut penulis, feminisme sebagai teori memberi dasar-dasar ontologis dan epistemologis dalam pergerakan perempuan di Indonesia. Feminisme sebagai gerakan sosial, memberi warna terhadap bangunan demokrasi pada masa lalu sampai sekarang dalam masyarakat Indonesia.

Gerakan kaum feminis di beberapa negara merupakan reaksi dari ragam ketidakadilan, adanya proses penindasan, dan eksploitasi. Kaum perempuan berjuang demi kesamaan, egalitas, kesetaraan, hak-hak yang sama, kesempatan yang sama dan kebebasan untuk mengontrol dan menentukan jalan kehidupannya sendiri. Reaksi ini diwujudkan oleh perempuan dalam beberapa bentuk aksi. Partisipasi perempuan dalam aksi nyata (empiris) dalam masyarakat dan dalam tulisan-tulisan .

Feminisme di Indonesia mulai muncul ke permukaan, setelah terbit buku kompilasi surat-surat Kartini dengan teman-temannya di Belanda (Ny. Abendanon, Stella, Ny. Ovink-Soer, dll) bertajuk *Door Duisternis Tot Licht* (1911). Buku ini, kemudian populer ketika Armin Pane, pujangga angkatan Balai Pustaka, menerjemahkannya dan memberinya judul *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Buku inilah yang memberi inspirasi bagi kaum perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan harkat dan

martabatnya agar sejajar dengan laki-laki. Sejarah feminisme Indonesia mencatat, tulisan R.A. Kartini meletakkan dasar bagi perjuangan perempuan Indonesia. Surat-surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda Ny. N. Van Kol, memberi semangat yang luar biasa bagi perempuan Indonesia. Dalam surat-suratnya, Kartini menceritakan kesedihannya sebagai anak-wanita seorang priyayi Jawa (Bupati). Ia selalu ditempatkan sebagai makhluk kelas dua setelah saudara laki-laknya. Perannya dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ayahnya seorang poligami, demikian ia juga harus menjadi istri dari suami yang berpoligami. Atas pengalaman yang dialaminya itu, Kartini sampai pada kesimpulan bahwa wanita harus bergerak dan bangkit melawan penindasan ini. Untuk bangkit itu, “Kartini bercita-cita memberi bekal pendidikan kepada anak-anak perempuan, terutama budi pekerti, agar mereka menjadi ibu yang berbudi luhur, yang dapat berdiri sendiri mencari nafkah sehingga mereka tidak perlu kawin kalau mereka tidak mau.” (Sulastin Sutrisno, Surat-Surat Kartini, Djambatan, 1985: xvii). Sampai pada titik ini, pemikiran-pemikiran feminis Kartini sangat jelas, walaupun akhirnya ia memilih untuk meninggalkan pemikiran-pemikirannya ini. Kartini rupanya lebih memilih tunduk pada takdir tradisi sebagai wanita Jawa. Ia memilih untuk menikah, punya anak, dan tidak bekerja mencari nafkah sendiri seperti yang ia angankan sebelumnya. Bahkan pernikahan poligami yang sebelumnya

sangat dimusuhi dan dianggapnya sangat “diskriminatif” terhadap wanita, akhirnya ia jalani.

Alhasil, kata “emansipasi wanita” saat ini menjadi kata-kata yang sangat familiar di negeri ini. Secara garis besar, dimasa lalu perjuangan feminisme di Indonesia berkembang melalui wadah organisasi-organisasi perempuan. Feminisme di Indonesia berkembang dan dipahami sebagai perjuangan perempuan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak lepas dari situasi pada masing-masing zaman. Pada masa penjajahan, perjuangan perempuan Indonesia dalam melakukan perlawanan kepada kolonial dan semangat Kartini melalui surat-suratnya, menginginkan persamaan akses bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan, berserikat (berorganisasi) memberi bentuk bagi perjuangan perempuan saat itu. Posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat sangat subordinat. Praktik poligami yang terjadi saat itu, pendidikan yang hanya bisa diakses oleh laki-laki dan tekanan pemerintah kolonial telah melatarbelakangi perjuangan kaum feminis. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih ke pendidikan dan itu pun baru upaya melek huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan di masa itu.

Sementara Cut Nyak Dien yang hidup di lingkungan yang tidak sepatriarki Jawa, telah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender. Apapun mereka adalah peletak dasar perjuangan perempuan kini.

Pasca kemerdekaan, perempuan juga mengambil bagian memperjuangkan kesetaraan memperoleh akses dalam negara. Dalam kesibukan revolusi fisik maupun dalam bidang sosial politik, pergerakan wanita berbenah diri untuk menggalang persatuan yang kuat. Kongres pertama diadakan di Klaten pada bulan Desember 1945, dengan maksud menggalang persatuan dan membentuk badan persatuan. Isu-isu yang berkembang sebenarnya belum jauh dari masa sebelum merdeka. Emansipasi di berbagai bidang termasuk penolakan poligami, pembenahan pendidikan dan sebagainya. Untuk pertama kali, ditetapkan aturan yang memberi perlindungan bagi perempuan, yakni Undang-undang Keluarga Nomor 22 tahun 1946. Salah satu pasal menyebutkan bahwa perkawinan, perceraian dan rujuk harus dicatatkan (Warsito:2012). Pergerakan feminisme yang dilakukan oleh perempuan melalui organisasi perempuan; Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) –yang merupakan badan fusi Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) dan Wanita Negara Indonesia (Wani)--, Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Gerakan feminisme saat ini masih berjuang untuk akses pendidikan, menentang poligami, menolak kekerasan dalam bentuk pemerkosaan, dan kebutuhan perempuan pada masa itu .

Perjuangan membuahkan hasil. Berbagai akses dibuka seiring dengan masuknya arus demokrasi di Indonesia. Perempuan mendapatkan akses dalam pendidikan, politik dan beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat. Kemudian pada masa Orde Baru, semua gerakan termasuk gerakan perempuan ditekan oleh pemerintah. Citra perempuan dalam wacana rezim Soeharto digambarkan pasrah dan patuh atas sub-ordinasi yang dialaminya. Organisasi perempuan yang bisa berkembang pada periode pemerintahan Soeharto adalah organisasi yang difasilitasi oleh pemerintah misalnya, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), yang diciptakan untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Pada tataran empirik, feminisme di Indonesia juga diteliti di masa lalu. Mengenai kajian dan penelitian organisasi perempuan di Indonesia sebetulnya sudah cukup banyak dilakukan oleh akademisi dan aktivis perempuan. Seiring dengan semangat Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928, Kongres Perempuan yang pertama diselenggarakan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Sementara itu, Susan Blackburn (2009) dan Saskia Wieringa (1992) melanjutkan kajian mengenai gerakan

perempuan di Indonesia dengan melihat bagaimana kegiatan organisasi perempuan sejak kurun 1920-an itu berlanjut pada 1965, dan situasinya pada masa awal Orde Baru.

Setelah masa reformasi bergulir, gerakan perempuan Indonesia semakin menguat. Terbukanya kran demokrasi pada awal tahun 1999 menjadi pijakan yang menggembirakan bagi perempuan. Hal ini dapat ditelusuri dari peran negara yang ber-i'tikad untuk memperhatikan persoalan kesetaraan melalui ditetapkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Pengarus utamaan gender (*Gender Mainstreaming*) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan penerapan kebijakan yang berperspektif gender pada organisasi dan institusi. Pengarus utamaan gender merupakan strategi alternatif bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas budaya di dalamnya. UUD 1945, UU Pemilu, UU Partai Politik, dan beberapa peraturan lainnya telah mengatur tentang akses perempuan di Indonesia dalam politik, pendidikan dan segenap aspek lainnya. Jaminan ruang keterwakilan perempuan dalam berpolitik dengan kuota 30% oleh

perundangan, masuknya perempuan dalam eksekutif, kebutuhan perbaikan tingkat kesehatan reproduksi perempuan, hak-hak buruh perempuan, *equal* dalam memperoleh akses pendidikan, mulai nampak sebagai aksi perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di Indonesia.

Tumbuhnya kesadaran dan keadilan gender di berbagai lapisan masyarakat saat ini, tidak lepas dari rentetan perjuangan kaum feminis di berbagai masa sebelumnya. Feminisme sebagai teori dan gerakan sosial, berkembang dan membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Tapi harus diingat, tak satupun pihak yang mengagendakan perubahan menuju keadilan gender kecuali perempuan itu sendiri. Artinya, kesempatan mengakses dunia politik, ekonomi, dan lain-lain yang terbuka harus diikuti secara langsung oleh kelompok perempuan .

Upaya feminisme mewujudkan keadilan gender masih berat dan panjang. Diperlukan demokratikasi vertikal yang berkaitan struktur politik dan demokratisasi horisontal menuju peruntuhan patria.

# Hak-Hak kaum Feminis

Evi Nur Cahyani

Secara juridis (*de jure*) hak-hak perempuan di bidang, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik yang menjadi substansi dari Konvensi CEDAW, telah diakui dunia internasional termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tsb pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya. Setelah disahkannya Konvensi CEDAW, pertemuan kaum perempuan sedunia dilanjutkan dalam Konferensi Perempuan II tahun 1980 di Kopenhagen, III di Nairobi pada tahun 1985 dan tahun 1995 yang IV di Beijing. Perjuangan kaum perempuan serta aktivis perempuan sedunia terus aktif dalam mengikuti perkembangan dunia dengan mengikuti pertemuan-pertemuan internasional, seperti Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro tahun 1992, Hak Asasi Manusia tahun 1993, Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 dan pertemuan internasional lainnya.

Oleh karenanya hak-hak perempuan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Hukum Nasional) dapat digali melalui naskah akademisnya (*Academic Draft*) sebagai pembentukan hukum yang tumbuh dan

berkembang, guna keadilan dan kepastian hukum untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sesuai dengan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Hak-hak perempuan tanpa diskriminasi berlaku secara universal berdasarkan hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations) dengan berbagai upaya melaksanakan hak-hak perempuan tanpa diskriminasi melalui konvensi; yaitu dengan mensahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tahun 1979, dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1984.

Hak-hak perempuan yang diperjuangkan sejak abad 18, dimulai dengan merumuskan “feminisme” oleh seorang feminis asal England: Mary Wollstonecraft (1759-1799).

Pada rumusan Wollstonecraft tersebut hak perempuan dianalisis dan hak perempuan terbatas pada hukum dan adat (budaya) yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan suatu negara. Kupan feminisme menurut Wollstonecraft berperspektif pada kurangnya pendidikan pada perempuan, sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan hak-haknya yang tertinggal dari kaum laki-laki. Kiprah perempuan dalam keluarga pada masa itu dalam melaksanakan hak-haknya, baik sebagai individu (sebagai warga negara), sebagai ibu,

sebagai istri, wajib dilaksanakan dalam bingkai sistem hukum nasional dari negara yang bersangkutan (Feminisme liberal). Reaksi terhadap Feminisme Liberal adalah Feminisme Marxisme, yang menekankan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan karena tindakan individu secara sengaja tapi akibat dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme.

fokus perbedaan hak-hak perempuan dan laki-laki dikarenakan seks/biologis, sebenarnya adalah karena sistem patriarki (sistem kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan keluarga) yang telah direseptir dalam adat dan kebiasaan. Seorang feminis Stone, mengemukakan bahwa ketertindasan kaum perempuan karena adanya hubungan sosial dalam proses reproduksi bukan hubungan sosial dalam proses produksi, yang cenderung menjadikan hubungan tersebut menjadi hubungan eksploitatif. Analisis hak-hak perempuan berdasarkan sistem patriarki tersebut mempermasalahkan keadaan biologi perempuan dan laki-laki berbeda adalah kehendak alam (*nature*), maka hal yang *nature* seperti takdir dan kodrat tidak dapat dirubah, sehingga “feminis radikal“ berpendapat hal tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling mengisi agar terwujud *natural order* seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan sosial antara laki-laki

dan perempuan bukan dalam proses reproduksi, melainkan dalam proses produksi.

Bukan disebabkan karena biologinya tetapi karena sifat feminim diciptakan oleh masyarakat. Teori Freud ini yang menjelaskan bahwa hasil dari proses pendewasaan seksual adalah gender. Teori Freud didukung oleh Dorothy Dinnerstein, Nancy Chodorow, Coral Gilligan dan Juliet Mitchell. Dalam mengembangkan Feminis Psikoanalisis, yang memfokuskan analisa tahapan pra-oedipus kompleks yang berbeda. Bahasan dari feminis psikoanalisis dimulai dengan tahapan pra-edipus kompleks, yaitu bagaimana hubungan ibu dan anak, hal ini adalah kunci untuk memahami bagaimana seksualitas dan gender dikembangkan dan mengapa perkembangan tersebut menghasilkan dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Seorang feminis Heidi Hartman (Feminis Sosialis) dalam bukunya “The Unhappy Marriage of Marxist and Feminism” yang menganalisis hak-hak perempuan melalui dua pendekatan yang berbeda yaitu: *Dual System Theory* dan *Unified System Theory*. Kapitalisme sebagai struktur materil atau historis berakar pada *mode of production*, yaitu cara bagaimana kegiatan produksi dilakukan, sedang patriarki secara historis berakar pada *mode of reproduction/sexuality*, cara bagaimana

proses reproduksi/seksualitas dilakukan. Penulis lainnya tentang *Dual System* menggambarkan patriarki sebagai struktur yang non material, yaitu suatu struktur yang ideologis dan atau stuktur yang psikoanalitik. Sedangkan *Unified System Theory* (Irish Young dan Alian Jagar), menganalisis kapitalisme dan patriarki bersama-sama menggunakan satu konsep. Konsep tersebut adalah pembagian kerja secara seksual yang dianggap mampu mengakomodasikan pandangan-pandangan feminis Marxis, radikal dan psikoanalisis. Sedangkan penulis lainnya Alison Jaggar menggunakan konsep alinasi (alienation) dan menganggap konsep ini cukup mampu pula untuk mengakomodasikan pandangan ketiga perspektif tersebut. Tong yang mengupas beberapa perpektif feminisme dan menganggap teori ini ambisius dibanding dengan Dual System Theory.

Lain halnya dengan seorang perempuan Perancis (kelas borjuis) yang menulis “The Second Sex”, dari de Beauvoir berpendapat bahwa: seorang perempuan terobsesi karena mereka “orang lain”, karena bukan pria. Seorang perempuan harus mampu menjadikan keberadaannya. Karena ketidakpuasannya terhadap penjelasan biologi, psikologi dan ekonomi, de Beauvoir mencari penjelasan ontologi yang diberikan pada keberadaan perempuan (*women’s being*).

Pengalaman dari de Beauvoir seorang gadis Perancis (kelas borjuis) yang menikah, menjadi ibu dan istri, di mana fungsi yang merangkap dua peran yang menghalangi kebebasannya. Seorang wanita karir diharapkan mampu menjalankan pekerjaan secara profesional dengan tidak harus menghilangkan feminitasnya sebagai seorang perempuan. Di situlah letak ke-*otherness*-annya. beberapa perspektif feminisme dan mengangap teori ini ambisius dibanding dengan *Dual System Theory*. Lain halnya dengan seorang perempuan Perancis (kelas borjuis) yang menulis “The Second Sex”, dari de Beauvoir berpendapat bahwa: seorang perempuan terobsesi karena mereka “orang lain”, karena bukan pria. Seorang perempuan harus mampu menjadikan keberadaannya. Karena ketidakpuasannya terhadap penjelasan biologi, psikologi dan ekonomi, de Beauvoir mencari penjelasan ontologi yang diberikan pada keberadaan perempuan (*women’s being*). Pengalaman dari de Beauvoir seorang gadis Perancis (kelas borjuis) yang menikah, menjadi ibu dan istri, di mana fungsi yang merangkap dua peran yang menghalangi kebebasannya. Seorang wanita karir diharapkan mampu menjalankan pekerjaan secara profesional dengan tidak harus menghilangkan feminitasnya sebagai seorang perempuan. Di situlah letak ke-*otherness*-annya.

# **Hak Pendidikan bagi Feminis**

Evi Nur Cahyani

Berbicara soal perempuan, maka satu hal yang terbesit di pikiran kita adalah kata “Feminisme”. Feminisme bukan hadir untuk memperbaiki relasi gender. Namun feminisme justru menyuguhkan konsep-konsep yang membahas tentang relasi gender. Maka, bukan feminisme yang "memperbaiki". Tapi justru subjek atau masyarakatlah yang harus memahami apa sebenarnya hakikat daripada feminisme. Ada beberapa orang yang tidak suka mendengar kata bahwa Feminisme adalah gerakan yang membenci laki-laki dengan dibarengi praktik-praktik radikal yang tidak sesuai norma-norma.

Pendidikan tentang kesetaraan gender, menghormati perempuan dan peran gender di dalam masyarakat menjadi topik yang sangat krusial saat ini. Maka ketika masyarakat tidak paham tentang hakikat feminisme, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahamkan keilmuan pengetahuan kita terhadap masyarakat awam dengan bahasa-bahasa yang sederhana dengan metode perumpamaan. Jangan muluk-muluk bawa teori-teori dulu. Masyarakat lebih suka pengalaman dan sejarah

Feminisme tidak hanya membebaskan perempuan, gerakan ini juga membebaskan laki-laki dengan memutus

standar-standar yang diberikan masyarakat pada perempuan dan laki-laki. Feminisme adalah tentang mengubah peran-peran gender, norma seksual dan praktik-praktik seksis yang membatasi diri. Feminisme seharusnya memperbaiki relasi gender, bukan memperkuat salah satu jenis kelamin dengan mengorbankan yang lain.

Para feminis berkeyakinan bahwa perempuan tidak boleh didiskriminasi atas dasar peran gender. Misalnya, perempuan semestinya bebas dari perasaan mencekam dan ketakutan akan kekerasan atau persekusi yang berlandaskan pada hubungan gender, baik itu di dalam rumah, dan tempat kerja, termasuk di tempat umum.

Agar tidak salah memahami, agaknya kita perlu *open mind* sejenak; (1) feminis tidak bertujuan untuk menjadi “sama” dengan laki-laki, akan tetapi feminis ingin memiliki kesetaraan peran dan hak – artinya kesetaraan hak-hak dan kesempatan, perlakuan yang adil, dan tidak adanya diskriminasi. (2) feminis menginginkan perlakuan adil antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan peran gender. Ini tentu saja sama sekali tidak berhubungan dengan kodrat. Pendidikan tentang kesetaraan gender, menghormati perempuan dan peran gender di dalam masyarakat menjadi topik yang sangat krusial dalam upaya menghindari kesalahpahaman di masa depan.

Perempuan haruslah hadir sebagai promotor membangunkan semangat kesadaran yang lebih berarti dan menunjukkan jalan kepada kaum perempuan (mahasiswi) untuk menjadi manusia yang lebih berisi. Juga dengan mengubah perspektif bahwa perempuan bukanlah berjalan melawan laki-laki, tapi aksinya berjalan bersama laki-laki, sama-sama berjuang, bahu membahu sama-sama bahagia dan sejahtera. Terlebih tugas perempuan tidak hanya mengkaji soal dua subjek “perempuan” dan “laki-laki” saja, tetapi juga pada perubahan struktur masyarakat dan relasi kuasa yang ikut memengaruhinya. Sebut saja paham kapitalisme, liberalisme, sosialisme dan lain sebagainya yang masih kita rasakan sampai sekarang ini.

Jika dikaitkan dengan peran perempuan sebagai mahasiswi, maka perempuan harus menjadi garda terdepan dalam tiga fokus, gerakan dakwah keagamaan, gerakan intelektual, dan gerakan sosial. Dalam gerakan dakwahnya, perempuan harus mampu mereposisi perannya sebagai mahasiswi dalam berbagai aktivitas keagamaan. Dalam gerakan intelektualnya, perempuan harus mampu merespon kebutuhan riil masyarakat melalui bekal penguatan keilmuan. Sehingga pergerakan apapun berdasarkan ilmu dan *by data* (empiris). Dalam gerakan sosialnya, perempuan harus mampu mengambil hati masyarakat khususnya perempuan dan berbaur dengan nilai-nilai kemanusiaan, responsif terhadap

isu-isu keperempuanan yang berkaitan dengan gender dengan membangun banyak relasi.

Sangat diakui masyarakat saat ini masih sangat kental dengan budaya zaman penjajahan dulu. Tanggapi dengan santai. "Pendidikan tinggi bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga perempuan". Sebut saja RA Kartini yang bersekolah di zaman Belanda dan mahir berbahasa Belanda. Hingga Kartini mendirikan sekolah untuk rakyat khususnya perempuan yang tidak bisa baca tulis. Hingga banyak perempuan berdalih, "Saya mau *niru* Kartini".

Wanita berpendidikan tinggi di era sekarang menurut saya sangat penting. Berpendidikan tinggi tidak hanya berfokus untuk bekerja. Tapi akan lebih berguna kelak ketika berumah tangga dan memiliki anak. Karena pola asuh wanita berpendidikan tinggi dan tidak berpendidikan akan berbeda. *Al-Ummu madrasah Al-ula* (ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya) bila sang ibu mempersiapkan dengan baik maka ibu telah mempersiapkan bangsa yang baik dan kuat". Tapi menurut saya, jangan dijadikan acuan juga. Peran ayah juga termasuk di dalamnya. Jika dijadikan acuan, dikhawatirkan bisa berdampak pada seksisme. Pola asuh ayah sama pentingnya dengan pola asuh ibu. Dari ayah, anak perempuan belajar bagaimana rasanya diperhatikan laki-laki. Ayah juga mengajak bagaimana menjadi laki-laki dalam

memperlakukan perempuan-perempuan sehingga ketika ia dewasa nanti, ia punya profil laki-laki yang baik.

Banyak pemahaman yang menyamaratakan bahwa paham feminisme sebagai gerakan “membenci laki-laki”. Padahal pada hakikatnya, gerakan feminisme bertujuan mencari persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi dan politik. Menurut saya, setara adalah perihal gender/konstruksi sosial masyarakat. Merujuk pada peran dan tugas di ranah sosial. Sedangkan "Sama", adalah perihal kodrat. (Perempuan bisa melahirkan sedangkan laki2 tidak bisa. Maka tidak bisa disamakan secara biologis (Ada banyak ayat yang mengutarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan juga menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan manusia, tanpa terkecuali, dengan setara.

Bahaya jika keliru dalam menginterpretasi feminisme yang dipahami sebagai sebuah keinginan dari kalangan perempuan untuk menjadi “sama” dengan laki-laki. Atas dasar inilah mereka menolak paham feminisme karena di dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda .

Pertama, feminis tidak bertujuan untuk menjadi “sama” dengan laki-laki, akan tetapi feminis ingin memiliki kesetaraan peran dan hak – artinya kesetaraan hak-hak dan kesempatan,

perlakuan yang adil, dan tidak adanya diskriminasi .Kedua, feminis menginginkan perlakuan adil antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan peran gender. Ini tentu saja sama sekali tidak berhubungan dengan kodrat.

# Konsep Feminisme dalam Islam

Evi Nur Cahyani

Dunia dibangun dengan cara berpikir dan dalam perspektif laki-laki, atau lebih tepatnya maskulinitas. Sementara perempuan dalam ideologi ini selalu dipandang sebagai eksistensi yang rendah dan ditempatkan sebagai makhluk domestik dan untuk kepentingan seksualitas laki-laki. Ideologi patriarkis telah muncul sejak abad yang amat dini dalam sejarah peradaban manusia.

Konon kisah kejatuhan Adam dari surga gara-gara Hawa; dianggap sebagai titik awal penindasan tersebut. Ia dihidupkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi dan kurun waktu yang sangat panjang melalui teks-teks keagamaan dan mitologi-mitologi. Tak pelak, kondisi kebudayaan seperti ini kemudian melahirkan berbagai bentuk aturan, kebijakan, dan praktik-praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang acap kali dianggap sebagai situasi dan praktik yang wajar dan baik-baik saja.

Secara historis, kata feminisme pertama kali muncul pada tahun 1859. Feminisme merupakan konsep yang muncul dan mengalami keterkaitan dengan dengan perubahan sosial (sosial change), teori-teori pembangunan, kesadaran politik dan gerakan pembebasan kaum perempuan.

Kata feminisme berasal dari bahasa latin femina, yang kemudian disadur dalam bahasa Inggris menjadi feminine, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan gadis atau wanita. Kata feminine kemudian digabung dengan kata ism (aliran) sehingga

menjadi feminisme, yang berarti keadaan keperempuanan, atau dapat pula berarti paham keperempuanan.

Ditelusuri sejak awal, sesungguhnya pola-pola yang diperjuangkan oleh kaum feminis sudah ada dalam awal Islam, yang tentunya di zaman Rasulullah. Islam datang untuk menyelamatkan kaum perempuan dan umat manusia dari praktik-praktik yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaan seperti itu. Islam mengancam keras tradisi penguburan hidup-hidup anak perempuan, memberikan aturan dan tata cara pernikahan secara jelas, serta mengatur secara jelas hak perempuan untuk mendapatkan warisan.

Dalam ensiklopedi *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, dikatakan bahwa feminisme modern dikenal di Islam sejak awal abad 20, meskipun mereka barangkali tidak menggunakan istilah itu. Pemikiran feminisme di dunia Islam dapat dilacak melalui pemikiran-pemikiran Aisha Taymuriyah (penulis dan penyair muslim), Zainab Fawwaz (essays Libanon), Rokeya Sakhawat Hossain, Nazar Haydar, Emilie Ruete (Zanzibar), Huda Shawari, Malak Hifni Nasir, Nabawiyah Musa dari Mesir dan Fame Aliye dari Turki (Badran, 1995). Mereka dikenal sebagai para tokoh perintis dalam menumbuhkan kesadaran atas persoalan gender, termasuk melawan kebudayaan dan ideologi masyarakat yang hendak menghalangi kebebasan perempuan.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1990, istilah feminisme sudah diterima terutama sejak diterbitkannya beberapa buku terjemahan dari para tokoh Muslim, seperti buku dari Riffat Hasan, Fatima Mernisi, Amina Wadud, dan Asghar Ali Engineer.

Salah satu ayat yang banyak digugat kaum feminis adalah kepemimpinan dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 34 yang artinya: *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

Mereka menolak jika ayat itu diartikan sebagai keharusan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Bagi mereka, penempatan wanita sebagai pihak terpinpin adalah konsep budaya, bukan hal yang kodrati (Husaini & Husni, 2015). Amina Wadud menulis tentang hal ini: "Seorang wanita yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin akan lebih baik dalam memimpikan suatu bangsa menuju upaya masa depan mereka. Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anak. Jika tidak selamanya, maka mungkin secara temporer, misalnya ketika istri jatuh sakit, suami harus dibolehkan untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana kepemimpinan adalah bukan karakteristik abadi dari semua laki-laki, begitupun perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua wanita".

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang menjadi kepastian. Karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam Alquran. perbedaan tersebut dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kodrat. Sebagaimana yang disebutkan dal Alquran surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya: *"sesungguhnya sesuatu Kami ciptakan dengan qadar."*

Perbedaan biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. keduanya memiliki tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama yang dianugerahkan oleh Allah. Di dalam Alquran, Allah memuji Ulil Albab, yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian dan bumi. Zikir dan pikir yang mengantarkan manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia alam semesta. Ulil Albab tidak terbatas dalam laki-laki tetapi juga untuk perempuan. karena setelah Alquran menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat ulul abab, berikutnya Alquran menegaskan dalam surat Ali-Imran ayat 195 yang artinya: *"maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan firman: Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain."*

Dengan demikian, kaum perempuan setara dan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya. Sebagaimana kaum laki-laki, perempuan mempunyai kemampuan berpikir, mempelajari, dan mengamalkan apa yang

mereka hayati dan bertafakur serta bezikir kepada Allah. Selain itu juga dari yang mereka pikirkan tentang alam semesta ini.

Laki-laki dan perempuan juga sama dan setara di hadapan Allah. Memang dalam Alquran terdapat ayat yang berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin para perempuan, akan tetapi kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarkan kepada kesewenang-wenangan. Karena Alquran di satu sisi memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan. Pada sisi yang lain Alquran juga memerintahkan untuk berdiskusi dan musyawarah dalam persoalan mereka. Tugas kepemimpinan itu selintas adalah sebagai sebuah keistimewaan dan “derajat yang tinggi” dari perempuan. Namun derajat itu adalah kebesaran hati suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban-kewajibannya.

Persamaan antara laki-laki dan perempuan , juga persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam. Dalam Alquran, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya: *"hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui".*

Ayat di atas menegaskan tinggi rendah derajat seseorang ditentukan oleh nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan yang mendasar dan substansial dalam

beberapa hal utama seperti asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan kedudukan serta perannya, tugas lagi tanggung jawabnya.

Dari uraian mengenai tata cara penafsiran kaum feminis Muslim, terlihat bahwa mereka sendiri terjebak dalam ‘pra-pemahaman’ subjektif dari konsep gender sekular-liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk peradaban Islam. ‘Keadilan’ menurut Islam maksudnya bukanlah sama-rata sama-rasa, namun menempatkan sesuatu sesuai koridor fitrahnya masing-masing.

# Ideologi Sosialisme dan Kapitalisme

Evi Nur Cahyani

Sosialisme muncul sebagai paham ekonomi dan kemasyarakatan pada akhir abad ke-13 dan 19 di Eropa. Revolusi Industri yang terjadi di Inggris telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat, kaum borjuis yang menguasai sarana produksi karena penguasaan modal bertimbun di tangan mereka. Sementara sebagian besar masyarakat kota hidup sebagai buruh yang tenaga kerjanya diperas dan semakin miskin. Kekayaan yang dihasilkan karena kerja keras kaum pekerja (*proletar*) ini hanya bisa dinikmati oleh kaum borjuis kapitalis yang jumlahnya tidak besar.

Demikian dari waktu ke waktu kesenjangan sosial dan ekonomi semakin kentara. Marxisme atau Sosialisme Marx pada mulanya merupakan sebuah aliran pemikiran ekonomi, namun kemudian disebabkan oleh tuntutan sejarah, berkembang menjadi aliran pemikiran kemasyarakatan dan ideologi politik yang revolusioner. Sebagai aliran pemikiran ekonomi, Marxisme menggariskan tatanan kehidupan ekonomi tanpa kelas, yang didalamnya kepemilikan sarana produksi bersifat kolektif. Tujuan itu bisa dicapai dengan menghapuskan kepemilikan pribadi

dan mendistribusikan kekayaan beserta sumber-sumbernya kepada rakyat secara merata.

Pandangan ini kemudian diperluas menjadi sistem nilai yang mencakup semua aspek kehidupan. Karena adanya ide untuk mencetuskan revolusi itulah Marx menyusun suatu falsafah kehidupan untuk menopang paham sosialismenya di bidang ekonomi dan politik. Sebagaimana diketahui sosialisme Marx memusatkan perhatian pada masalah kebendaan (materi) dan kebutuhan dasar manusia. Pandangan filosofinya kemudian dikenal sebagai paham materialisme historis atau materialisme dialektik. Masalah moralitas, keagamaan, dan segala hal yang bersifat kerohanian pastinya tersingkir jauh dari paham ini.

Sebenarnya filsafat ini mulanya ditemukan oleh Hegel yang kemudian digunakan dan dibalikinya oleh muridnya Marx menjadi materialisme dialektik. Dalam pandangan Hegel, wujud alam ini merupakan akibat dari adanya gerakan evolusi dari ide-ide yang saling bertentangan (thesa dan anti-thesa), tetapi dalam perkembangan puncaknya kedua hal yang saling bertentangan tersebut berpadu menjadi satu (*sinthesa/sintesa*).

Mas'ud an Nadwi menguraikan bahwa dalam pandangan Hegel wujud alam ini merupakan suatu akibat dari adanya gerakan evolusi ide-ide (gambaran-gambaran), yang proses

kejadiannya ialah karena adanya daya tarik-menarik yang amat kuat, akibat adanya dua kekuatan yang saling bertentangan. Setiap benda mengandung kekuatan yang berlawanan dengan dirinya, seperti halnya adanya kekuatan positif terkandung pula di dalamnya kekuatan negatif. Akibat dari pertarungan dan tarik-menarik antara dua kekuatan tersebut, maka lahirlah kekuatan positif yang lebih efektif dibanding kekuatan sebelumnya.

Dengan demikian seterusnya historis perkembangan alam dan struktur sosial. Materialisme dialektik adalah paham yang meyakini bahwa asas kehidupan sepenuhnya bersifat kebendaan. Karena itu sejarah juga berkembang dan berubah disebabkan faktor-faktor dialektik dari hal-hal yang bersifat kebendaan. Kata *dialectics* atau *dialectical* berasal dari bahasa Yunani *dialeces* yang artinya ialah mematahkan argumentasi lawan dengan menggunakan pendapat yang bertentangan. Ini dianggap sebagai cara terbaik dalam mencapai kebenaran atau hakekat dari suatu kebenaran.

Menurut Marx yang hakiki bersifat kebendaan bukan yang bersifat kerohanian seperti ide. Pertarungan dua unsur kekuatan dalam diri benda ditafsir oleh Marx sebagai pertarungan benda untuk mempertahankan kekekalannya dalam alam. Berdasarkan paham materialisme dialektiknya. Lahirlah tesisnya tentang pertarungan kelas (*class struggle*) dalam masyarakat

industrial di Eropa pada abad ke 19. Kaum penindas oleh pemilik modal atau kapitalis borjuis. sedang lawannya ialah kaum buruh yang disebut sebagai proletar.

Pertempuran atau pertarungan akan terjadi jika kaum proletar mulai menyadari hak-haknya terampas, dan menyadari pula bahwa sejarah terus berkembang apabila mampu mendorong masyarakat memilih kekuatan yang mana mereka akan memihak. Kemenangan yang akan diarah oleh pemenangnya tidak lain merupakan akibat dari tatanan ekonomi yang berlaku pada masa itu. Jadi munculnya suatu masyarakat baru yang bercorak sosialis merupakan sitesia dari pertarungan kelas antara kaum kapitalis-borjuis dan proletar.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa saat ini pendidikan di Indonesia cenderung terindustrialisasi dan menjadi alat. Alat bagi si anak untuk memperoleh pekerjaan, alat bagi guru untuk memperoleh penghasilan, alat bagi pengelola sekolah untuk memperoleh keuntungan. Singkatnya lembaga sekolah tak lebih dari sekedar produk kapitalisme lanjut yang berorientasi pada kepentingan pasar. Ketika berbicara tentang pendidikan, tema-tema yang cenderung diperbincangkan adalah hal-hal yang bersifat teknis, seperti kurikulum, nilai ujian, efisiensi, daya saing, pendapatan guru dan sebagainya.

Persoalan kemanusiaan baru dibicarakan ketika semua orang telah menyadari bagaimana rendahnya produk lulusan pendidikan yang selama ini. Birokrat yang doyan korupsi, artis yang senang mengumbar aurta, pengusaha yang eksploitatif, buruh dan mahasiswa yang anarkis dan sebagainya harus diakui sebagai cerminan kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal menilik esensinya, pendidikan adalah usaha humanisasi, sebuah usaha kolektif dimana peserta didik dikenalkan dengan kemanusianya sendiri.

Pendidikan adalah suatu hal yang bersangkutan-paut dengan manusia maka tidak selayaknya pendidikan menghempaskan asa kemanusiaannya. Sistem pendidikan yang menindaskan kapitalistik diartikan sebagai pelanggeng hegemoni kaum-kaum dari kelompok sosial tertentu untuk menisndas kaum-kaum dari kelompok sosial lainnya. Menindas juga dapat dipahami sebagai upaya menafikkan ide-ide tentang kemanusiaan.

Pendidikan Indonesia selalu dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang sangat tidak menguntungkan pihak terdidik. Pemerintah selalu menggembar-gemborkan kurikulum baru yang menurut mereka lebih bagus, lebih tepat sasaran, lebih up-date.

Lebih kebarat-baratan dan sebagainya. Namun itu semua tidak memudarkan image dan bahkan semakin memperjelas, bahwa intitusi pendidikan tak ubahnya seperti mesin pencetak ijazah. Dengan membayar sejumlah tarif tertentu, seseorang dengan mudah akan memperoleh gelar kesarjanaan dan ijazah tanpa melewati proses edukatif apapun.

Pendidikan bukan lagi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang masih tertulis di UUD 1945. Tapi justru lebih mirip mesin usang yang mengeluarkan produk yang sulit diandalkan kualitasnya. Pendidikan lebih diarahkan pada menyiapkan tenaga buruh saat ini yang dibutuhkan oleh mesin-mesin dan birikrasi kapitalis. Materi ajar dijejalkan kepada peserta didik dan kesemuanya itu hanya ditunjukkan untuk mendapatkan kelulusan dan ijazah. Mereka tidak lagi disiapkan menjadi pemikir handal, ilmuwan dan pribadi yang memiliki integritas keilmuan dan kemanusiaan yang kuat.

Dengan pendekatan kapitalistik dan pola pikir ‘buruh’ itu sekolah menjadi mahal, dan menikmati pendidikan yang berkualitas merupakan hal yang mustahil bagi masyarakat bawah. Stigma yang terbenam di benak para penyelenggara dan birokrat pendidikan nasional bahwa sekolah itu memang mahal adalah opini yang keliru. Malaysia, Jerman, dan bahkan Kuba’

sekalipun bisa membuat pendidikannya sangat murah dan dapat diakses oleh sebagian besar lapisan masyarakat.

Karena Marxisme adalah teori kritik yang menyibak adanya ideologi penindasan dalam struktur masyarakat berkelas yang menindas, makanya cita-cita pendidikan Marxis bertujuan untuk mewujudkan kembali kesadaran manusia agar ia mampu hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaannya.

Pertama pendidikan harus dilakukan dengan penyadaran dan mendorong manusia mengenali dan melawan hambatan-hambatan material yang ada. Selanjutnya pendidikan secara menyeluruh harus digunakan untuk menciptakan tatanan yang sesuai bagi hakikat manusia, yaitu tatanan dimana kontradiksi berupa hubungan produksi yang eksploitatif (kapitalis) digantikan dengan hubungan produksi yang setara, yang seringkali disebut Marx dan para pengikutnya sebagai sosialisme.

Sosialisme menghendaki adanya sosialisme alat-alat produksi dan sumber-sumber ekonomi dengan menghilangkan kepemilikan pribadi (private property terutama bagi aset-aset vital dan menentukan hajat hidup orang banyak. Dalam sosialisme diniscayakan adanya kontrol yang demokratis terhadap sumber-sumber ekonomi, dan tentu saja terhadap sumber-sumber kekuasaan politik karena politik biasanya

mengatur bagaimana kebijakan ekonomi suatu masyarakat. Jadi secara politik, sosialisme juga menginginkan adanya partisipasi politik. Kesadaran politik dan kebijakan yang didasarkan pada kehendak mayoritas akan adanya penataan ekonomi yang adil.

Pendidikan harus diberikan secara massal. Karena dengan adanya massalisasi pendidikan. Upaya menciptakan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan yang meluas juga dimungkinkan. Jadi pengetahuan dan teknologi juga harus disosialisasikan bersamaan asset-aset produksi.

Dalam masyarakat berkelas (*feodalisme dan kapitalisme*), hanya sedikit orang yang berwawasan dan terampil, yaitu kalangan penindas dan penguasa, sehingga pos-pos ekonomi dan kekuasaan pun dipegang oleh mereka dan untuk mereka sendiri. Bagi Marx tujuan sosialisme adalah emansipasi manusia dan emansipasi manusia sama dengan perwujudan diri dalam proses hubungan dan kesatuan yang produktif dengan manusia dan alam.

Tujuan sosialisme adalah pengembangan kepribadian individu. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme. Marx menuding bahwa dalam masyarakat borjuis, modal itu bebas dan memiliki individualitas. Sedangkan manusia hidup bergantung dan tidak memiliki individualitas. Dalam mendefinisikan buruh, ia menyatakan bahwa buruh adalah sebuah proses dimana manusia

dan alam berpartisipasi, dan dimana manusia berkendak sendiri memulai mengatur dan mengendalikan hubungan material antara dirinya dan alam.

Sosialisme adalah sebuah masyarakat yang memberi ruang bagi aktualisasi manusia, dengan cara mengatasi alienasinya. Untuk menciptakan dan mempertahankan sosialisme, sebagai jalan pembebasan manusia, pendidikan harus demokratis, menciptakan kondisi anak-anak didik yang benar-benar bebas, rasional, aktif dan independen.

Dengan demikian output dari pendidikan Marx ini mengimplementasikan kemanusiaannya yang sejati dalam aktivitas-aktivitas produksinya tidak meleburkan dirinya dalam keterasingan, dan mewujudkan pola hubungan yang setara. Marx mengkritik keras institusi pendidikan dan media hiburan yang diciptakan pemerintah kapitalistik. Institusi pendidikan menurut Marx, hanyalah sebagai suatu pelayanan terhadap keperluan-keperluan ekonomi, dengan memberikan indoktrinasi kepada individu-individu tentang norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung status quo, dan dengan melatih mereka menduduki posisi-posisi pekerjaan dalam sistem ekonomi kapitalisme tersebut. Berbagai bentuk industri hiburan dipandang juga sebagai suatu usaha untuk mengalihkan atau menenangkan orang.

Prinsip Marxisme yang dikaitkan dengan masalah pendidikan akan menunjukkan bahwa pendidikan sebagai proses historis dalam kehidupan manusia ditentukan oleh perkembangan masyarakat yang, tentu saja, didasari oleh kondisi material-ekonomis yang berkembang. Karena Marx menempatkan pendidikan pada wilayah struktur atas (suprastruktur) yang disangga oleh ekonomi sebagai fondasi perkembangan masyarakat, maka pendidikan juga adalah media sosialisasi pandangan hidup dan kecakapan yang harus diterima pada masyarakat (terutama anak-anak).

Satu hal yang menarik dari pemikiran Marx adalah ketidakberpihakannya pada bentuk pendidikan yang legal-formalistik, dengan mengurung peserta didik di balik tembok kokoh sekolah tanpa mendorong mereka untuk keluar merasakan realitas alam di sekelilingnya. Dalam hal ini, perjalanan sejarah masyarakat telah mencatat perkembangan yang terus berubah, yang akhirnya menciptakan lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan struktur ekonomi, sosial dan politik yang berkembang. Lembaga Pendidikan dalam berbagai proses sejarah mengalami perubahan.

Marxisme-Sosialisme adalah teori yang dirancang untuk membangun masyarakat yang baik. Suatu masyarakat yang meniadakan penindasan kelas yang satu terhadap kelas yang lain,

adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk mengekspresikan kemanusiannya dalam setiap aktivitas produksi sebagai basos kehidupan manusia. Marxisme menolak keras pola-pola pendidikan yang hanya menyiapkan peserta untuk buruh yang nantinya akan diperas oleh mesin-mesin produksi.

Dalam pandangan Marxisme praktik dalam arti keterkaitan langsung manusia dengan realitas dan alam material, adalah kriteria kebenaran, karena mendasari pengetahuan tentang realitas dan karena hasil dari proses kognitif direalisasikan dalam aktivitas material, obyektif manusia. Praktik adalah satu-satunya kriteria obyektif kebenaran sejauh hal itu merepresentasikan bukan hanya mental manusia, namun juga keterkaitan manusia yang ada secara obyektif dengan dunia alam dan sosial yang melingkupi dirinya.

Pendidikan dalam pendekatan Marxis harus dilakukan dengan penyandaran dan mendorong manusia mengenali dan melawan hambatan-hambatan material yang ada. Selanjutnya pendidikan secara menyeluruh harus digunakan untuk menciptakan tatanan yang sesuai bagi hakikat manusia, yaitu tatanan dimana kontradiksi berupa hubungan produksi yang eksploitatif (kapitalis) digantikan dengan hubungan produksi yang setara. Karena itu pendidikan harus demokratis,

menciptakan kondisi anak-anak didik yang benar-benar bebas rasional, aktif dan independen.

## Daftar Pustaka

Agger, Ben. 1998. *Teori Sosial Kritis, kritik, penerapan dan implikasinya*. Jakarta: Kreasi Wacana.

Anshori, Dadang S, “*Dari Feminis hingga Feminin*”, dalam *jurnal Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997

Ariwidodo, Eko, “*Kontribusi Pekerja Perempuan Pesisir Sektor Rumput Laut di Bluto Kabupaten Sumenep*”, dalam *jurnal Nuansa*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember 2016

Astuti, Tri Marhaeni P. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.

Badran, Margot, “*Feminism*”, dalam *John L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, jilid 2, Oxford: Oxford University Press, 1995  
Bruinessen, Martin Van. 2013. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Gading.

Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia, 1995

Dzuhayatin, Fakhri, Mansour, (et.al.). 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Echol, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran. 2012. *Handbook Teori Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Gross, E and C. Pateman. 1986. *Feminis Challenge: Social and Political Theory*. Oston: Northeastern University Press.

Husaini, Adian dan Rahmatul Husni, “*Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender*”, dalam jurnal Al-Tahrir, Vol. 15, No. 2, November 2015

Ismail, Faisal. 2017. *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Husaini, Adian. 2018. *Pendidikan Islam: Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045*. Depok: Ponpes At-Taqwa Depok.

Hidayati, Siti. *Amal: “Beberapa Perspektif Feminisme Dalam Menganalisa Permasalahan Wanita”*, seorang pengajar Kajian Wanita UI, yang tulisannya dalam *majalah Antropologi Sosial*

dan *Budaya Indonesia* tahun 1992 mengambil tulisan Rosemarie Tong, "*Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*" (London: Umwin Hyman, 1989)

Hidayati. "*The Second Sex*" dari Simone de Beauvoir yang dikutip Hidayati dalam mengupas permasalahan wanita, yang secara lengkap mengacu pada tulisan Rosemarie Tong dalam: "*Feminist Thought, A Comprehensive Introduction*".

Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kurniawan, Syamsul. *Pendidikan Karakter (konsepsi dan implementasinya secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2013) hlm. 39.

Kurian, George Thomas (ed) (2011) *The Encyclopedia of Political Science*. CQ Press.

Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Ludwig von Mises (2016) *Socialism*. Ludwig von Mises Institute

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2017. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Mizan.

Madjid, Nurcholish. 2013. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

Mu'ammam, M Arfan. 2019. *Pendidikan Karakter Strategi Internalisasi Values dan Kajian Teoretis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muchlas Samami, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012), h. 59.

Mufron, Ali. 2013. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Aura Pustaka.

Mutohar, Anam dan Nurul Anam. 2013. *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nashir, Haedar. 2007. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah.

Ollenburger, Jane C dan Hellen A.Moore. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Rachman, Budhy Munawar, "Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia", dalam jurnal

*Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Ryan, Alan (2012) *On Politics: A History of Political Thought from Herodotus to the Present*. Penguin Books.

Sahala, Sumijati , Ahli Peneliti Muda Bidang *Keluarga (Wanita dan Anak)*, BPHN Dept Hukum dan HAM RI, S1 FH UI Tahun 1977, dan meraih Magister *Kajian Wanita UI* Tahun 1996.

Steele, David (1992). *From Marx to Mises: Post-Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation*. Open Court Publishing Company.

Surip, Ngadino, dkk. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta: ANDI.

Taniredja, Tukiran, dkk. 2016. *Paradigma Terbaru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.

UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Wartini, Atik, “*Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*”, dalam jurnal Palastren, Vol.6, No.2, Desember 2013

Wibowo, Agus. (2012). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Bangsa Berparadigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wieringa, Saskia “*Ibu Or The Beast: Gender Interest in Two Indonesian Women’s Organizations*”, *Feminis Review*, no. 41, 1992, hal. 110.

Wijaya, Aksin. 2015. *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam Yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.

Zulaiha, Eni, “*Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis*”, dalam jurnal *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016

# Tentang Penulis



Evi Nur Cahyani, biasa dipanggil Mbak Vii. Lahir di Mojokerto tepatnya di Desa Baureno pada 1 Mei 1997. Saat ini masih magang untuk menjadi PERS PIJARNews.ID. Penulis masih berstatus mahasiswa jurusan PAI semester 5 sekaligus Asisten Dosen di UMSurabaya. Penulis juga pernah mendapat artikel terbaik saat Orientasi Dinamika Kampus UMSurabaya tahun 2017.

Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris bidang Immawati di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Al Qossam periode 2018-2019 dan menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pendidikan Himpunan Mahasiswa pendidikan Agama Islam periode 2019-2020. Sedari kecil Penulis selalu berkeinginan menjadi yang berbeda dari temannya.

Penulis sangat mencintai dalam hal membaca sehingga untuk menambah wawasan tentang ilmu terutama pendidikan penulis banyak membaca berbagai literatur bacaan serta mengikuti seminar dan kajian. Penulis dapat dihubungi melalui telpon/WA 081332669516. Bisa follow ignya e\_n\_cahyani.



Penulis memiliki nama lengkap Thoriq Kemal, biasa dipanggil Cak Thor. Lahir di Surabaya, 18 Desember 1998. Saat ini tinggal di Sidoarjo, dan masih kuliah S1 PAI di Universitas Muhammadiyah. Di kampus pernah menjabat di Ketua bidang pendidikan HIMA PAI UM Surabaya periode 2019-2020 dan ketua bidang keilmuan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Al-Qossam 2019-2020. Saat ini berfokus pada dunia literasi dan menjadi kontributor di al-ibar.net. dapat dihubungi melalui WA 081455048697.



Nama Zuhraini Mahzura lahir di Lamongan, 11 Januari 2000. Mahasiswa jurusan PAI Universitas Muhammadiyah Surabaya dan tergabung dalam komunitas literasi “Gubuk Tulis”, sekretaris bidang Riset Pengembangan Keilmuan IMM komisariat Al-Qossam periode 2019-2020. menginginkan menjadi penulis, karena menulis merupakan sebuah bentuk ungkapan imajinasi batin yang dituangkan pada kertas keabadian. Penulis dapat dihubungi melalui WA atau telepon 085645388492